

2020



Pemalang
puséré Jawa

RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH (RENJA - PD) TAHUN 2021

DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN PEMALANG





**PEMERINTAH KABUPATEN PEMALANG
DINAS PERHUBUNGAN**

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PERHUBUNGAN
KABUPATEN PEMALANG
NOMOR : 050/ 142.B/2020

TENTANG

RENCANA KERJA DINAS PERHUBUNGAN
KABUPATEN PEMALANG
TAHUN 2021

KEPALA DINAS PERHUBUNGAN
KABUPATEN PEMALANG

- Menimbang : a. bahwa dengan ditetapkannya Peraturan Bupati Nomor 39 tahun 2020 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2021 maka perlu disusun Rencana Kerja Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2021 sebagai dokumen perencanaan tahunan;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 28 Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penyusunan Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah menyebutkan bahwa Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah ditetapkan dengan Keputusan Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Pemalang tentang Penetapan Rencana Kerja Dinas Perhubungan Kabupaten Pemalang Tahun 2021.
- Mengingat : 1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2004 tentang jalan
2. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025

3. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 22 tahun 2009 tentang Lalu lintas dan angkutan Jalan
4. Undang-undang nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
5. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaraan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
6. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
7. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
12. Peraturan Presiden Nomor 79 Tahun 2019 tentang Percepatan Pembangunan Ekonomi Kawasan Kendal – Semarang – Salatiga – Demak – Grobogan, Kawasan Purworejo – Wonosobo – Magelang – Temanggung, dan Kawasan Brebes – Tegal – Pemalang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 224)

13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 24 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2005–2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2009 Nomor 1);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 9 Tahun 2013 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2013 Nomor 9);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 12 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2016 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 12);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 1 Tahun 2018 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Pemalang Tahun 2018-2038 (Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2018 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 1);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 13 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pemalang (Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2019 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 13);
20. Peraturan Bupati Pemalang Nomor 90 tahun 2016 tentang Uraian Tugas dan Jabatan Struktural Dinas Perhubungan Kabupaten Pemalang;
21. Peraturan Bupati Pemalang No 35 Tahun 2020 Tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintahan Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2020;
22. Peraturan Bupati Pemalang Nomor 19 Tahun 2017 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2016-2021.
23. Peraturan Bupati Pemalang Nomor 35 Tahun 2020 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2021

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Menetapkan Rencana Kerja Dinas Perhubungan Kabupaten Pemalang Tahun 2021 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Rencana Kerja Dinas Perhubungan Kabupaten Pemalang Tahun 2021 sebagaimana dimaksud Diktum KESATU dipergunakan sebagai pedoman dalam pelaksanaan program dan kegiatan Dinas Perhubungan Kabupaten Pemalang Tahun 2021.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di **Pemalang**
pada tanggal Agustus 2020

Plt. KEPALA DINAS PERHUBUNGAN
KABUPATEN PEMALANG



EKO EDI PRIHARTANTO, SH., MM
Pembina Utama Muda
NIP. 19651104 199403 1 008

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT, atas rahmat dan karunia-Nya Rencana Kerja (Renja) Dinas Perhubungan Kabupaten Pemalang Tahun 2021 akhirnya dapat kami susun dengan segala keterbatasan yang ada.

Renja merupakan suatu proses yang berorientasi pada pada hasil yang dicapai pada kurun waktu satu tahun dengan memperhitungkan berbagai potensi dan hambatan yang ada agar dapat mencapai/mewujudkan target kinerja yang telah ditetapkan dalam Rancangan Renstra Perangkat Daerah 2016-2021. Renja ini berisi visi, misi, tujuan, sasaran, dan kebijakan serta program dan kegiatan yang realistis dan mengantisipasi masa depan yang diharapkan, dengan memperhitungkan capaian yang telah dicapai sampai dengan tahun sebelumnya.

Dalam penyusunan Renja ini masih perlu dimatangkan lagi melalui berbagai kegiatan antar seluruh komponen organisasi agar pelaksanaan program dan kegiatan dapat sejalan dengan rencana yang telah ditetapkan dalam Rancangan Renstra Perangkat Daerah 2016-2021 ini.

Renja Dinas Perhubungan Kabupaten Pemalang Tahun 2021 untuk dijadikan sebagai pedoman pelaksanaan kegiatan seluruh komponen organisasi dalam waktu satu tahun ke depan.

Semoga Allah SWT meridhoi segala usaha dan upaya kita.

Pemalang, Agustus 2020



PIH. KEPALA DINAS PERHUBUNGAN,
KABUPATEN PEMALANG

EKO EDI PRIHARTANTO, SH., MM

Pembina Utama Muda

NIP. 19651104 199403 1 008

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	i
KEPUTUSAN KEPALA DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN PEMALANG NOMOR 050/142.B/2020	
DAFTAR ISI.....	ii
DAFTAR TABEL.....	iii
BAB I Pendahuluan	
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Landasan Hukum	2
1.3 Maksud dan Tujuan.....	5
1.4 Sistematika Penulisan.....	6
BAB II Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu	
2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah	7
2.2 Analisis Kinerja Pelayanan PD	19
2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	33
2.4 Review Terhadap Rancangan Awal Perangkat Daerah.....	38
2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat.....	46
BAB III Tujuan, Sasaran, Program dan Kegiatan	
3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional dan Provinsi Jawa Tengah	45
3.2 Tujuan dan Sasaran Rencana Kerja Perangkat Daerah.....	57
3.3 Program dan Kegiatan Perangkat Daerah	61
BAB IV Penutup	77

DAFTAR TABEL

Tabel2.1	Pencapaian Sasaran Program dan Kegiatan Tahun 2019 Dinas Perhubungan.....	7
Tabel 2.2	Rekapitulasi, Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah, Pencapaian Renstra Perangkat Daerah Sampai dengan Tahun 2019 Kabupaten Pemalang	10
Tabel 2.3	Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Dinas Perhubungan Kabupaten Pemalang	30
Tabel 2.4	Hasil Evaluasi SPM bidang Perhubungan.....	34
Tabel 2.6	Review Terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2019. Kabupaten Pemalang	40
Tabel 3.1	Strategi dan Kebijakan	64
Tabel 3.2	Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2020 Kabupaten Pemalang.....	68

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

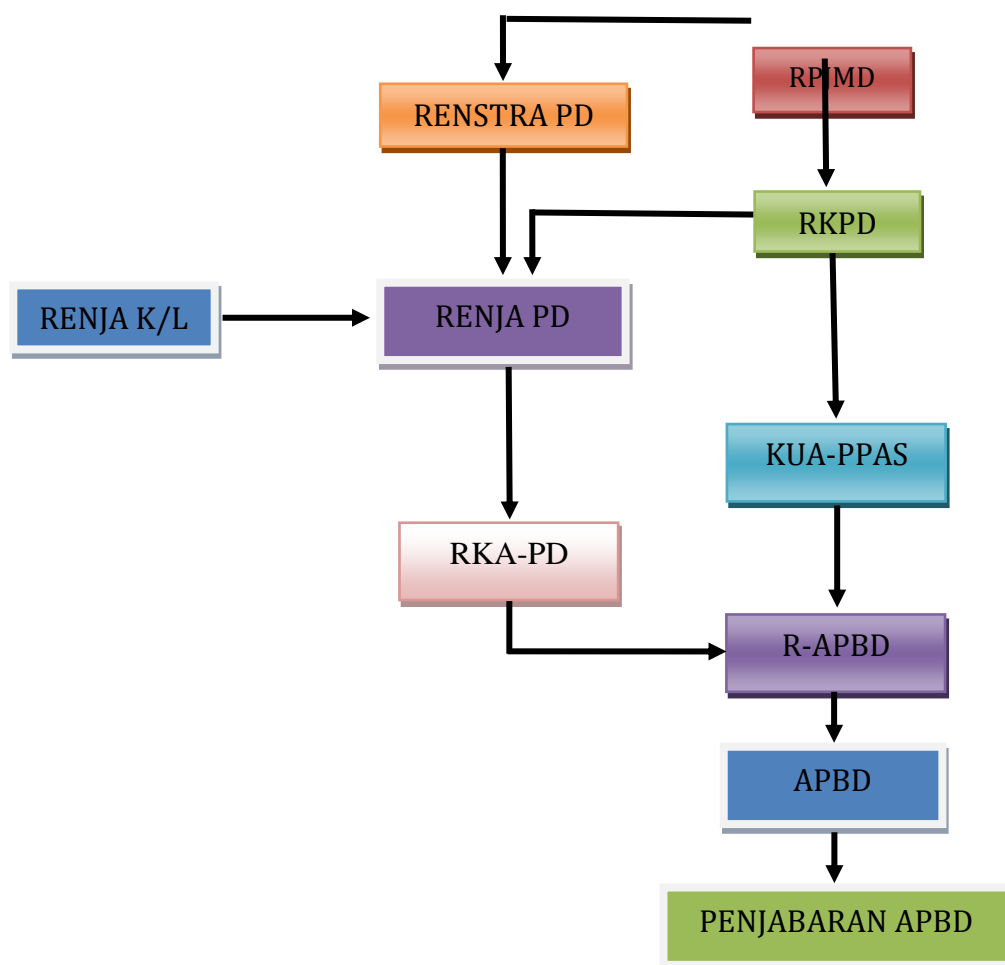
Rencana Kerja Perangkat Daerah selanjutnya disingkat Renja PD sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, yang dalam perkembangannya diubah dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 tahun 2017 (Pasal 11) tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.

Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja PD) merupakan Dokumen Perencanaan Tahunan pada level Organisasi Perangkat Daerah dan disusun sebagai penjabaran Rencana Strategis (renstra) yang berisi informasi tentang rencana program dan kegiatan yang akan dikerjakan oleh OPD dalam satu Tahun Anggaran sehingga memberikan gambaran mengenai Tujuan, Sasaran dan target kinerja OPD sesuai tupoksi. Secara fungsional Renja Dinas Perhubungan Kabupaten Pemalang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan dokumen perencanaan lainnya, baik yang terkait dengan sistem perencanaan pembangunan maupun dengan sistem pengelolaan keuangan.

Tahapan penyusunan Renja PD meliputi : persiapan penyusunan Renja PD, penyusunan Rancangan Awal Reenja PD, penyusunan Rancangan Renja PD, pelaksanaan Forum PD/ Lintas PD, perumusan Rancangan Akhir Renja PD, dan yang terakhir penetapan Renja PD.

Renja PD disusun dengan mengacu pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Pemalang tahun 2021, Renstra Dinas Perhubungan Kabupaten Pemalang tahun 2016 – 2021, Renstra Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018-2023, Renja Kementerian Perhubungan Republik

Indonesia Tahun 2021 hasil evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan periode sebelumnya, masalah yang dihadapi dan usulan program serta kegiatan yang berasal dari masyarakat, setelah Renja PD selesai ditetapkan (Tahap Perencanaan) selanjutnya dituangkan dalam RKA PD Tahun 2021 (Tahap Penganggaran).



1.2 Landasan Hukum

1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2004 tentang
2. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025
3. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu lintas dan Angkutan Jalan;
4. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
5. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;

8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
14. Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2012 tentang Strategi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Jangka Panjang Tahun 2012-2025 dan Jangka Menengah Tahun 2012-2014;
15. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional;
16. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
17. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2016 tentang Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2017;
18. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019;
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;

21. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2005-2025;
22. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009-2029;
23. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2013-2018 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2014 Nomor 5);
24. Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 24 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2005-2025;
25. Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 3 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Pemalang Tahun 2011-2031;
26. Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 9 Tahun 2013 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Pemalang;
27. Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 12 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Pemalang Tahun 2016-2021;
28. Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pemalang;
29. Peraturan Bupati Pemalang Nomor 62 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Perhubungan Kabupaten Pemalang (Berita Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2016 Nomor 67);
30. Peraturan Bupati Pemalang Nomor 90 Tahun 2016 tentang Uraian Tugas Jabatan Struktural Dinas Perhubungan Kabupaten Pemalang;
31. Permendagri Nomor 86 Tahun 2019 tentang Tata Cara Perencanaan Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
32. Permendagri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodifikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;

33. Surat Edaran Menteri Dalam Negeri 130/736/SJ tentang Percepatan Implementasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah oleh Tim Penyusun RKPD Tahun 2021.

1.3 Maksud dan Tujuan

Proses perencanaan membutuhkan kontinuitas untuk menjaga konsistensi pelaksanaan pembangunan untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Sebagai suatu dokumen rencana kerja, Renja Perangkat Daerah mempunyai kedudukan yang strategis yaitu menjembatani antara perencanaan strategis jangka menengah dengan perencanaan dan penganggaran tahunan.

Adapun maksud penyusunan Renja Organisasi Perangkat Daerah Dinas Perhubungan Kabupaten Pemalang Tahun 2021 antara lain adalah:

- a. Menjabarkan rencana strategis ke dalam rencana operasional;
- b. Memelihara konsistensi antara capaian tujuan perencanaan strategi jangka menengah dengan tujuan perencanaan dan penganggaran tahunan Organisasi Perangkat Daerah;
- c. Sebagai pedoman dan acuan bagi Dinas Perhubungan Kabupaten Pemalang dalam Perencanaan Program, Kegiatan maupun perencanaan kebutuhan anggaran / pagu indikatif pada Dinas Perhubungan Kabupaten Pemalang Tahun 2021.

Sedangkan tujuan penyusunan Rencana Kerja Dinas Perhubungan Kabupaten Pemalang tahun 2021 adalah :

- a. Menetapkan prioritas dan sasaran, rencana program dan kegiatan, indicator dan target, serta pagu indikatif tahun 2021 yang tertuang dalam arahan kebijakan berdasarkan hasil analisis dari evaluasi kinerja pelaksanaan program dan kegiatan tahun 2020
- b. Menjadi pedoman arah kebijakan dan program serta kegiatan operasional Dinas Perhubungan Kabupaten Pemalang dalam 1 tahun berjalan
- c. Sebagai tolak ukur guna melakukan evaluasi kinerja terhadap pencapaian sasaran kegiatan yang telah ditetapkan oleh Dinas Perhubungan kabupaten Pemalang

1.4 Sistematika Penulisan

Rencana Kerja (Renja) Dinas Perhubungan Kabupaten Pemalang Tahun 2021 disusun berdasarkan sistematika sebagai berikut :

BAB I : Pendahuluan, memuat perihal latarbelakang, landasan hukum, maksud dan tujuan, dan sistematika penulisan.

BAB II : Hasil Evaluasi Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu, memuat perihal Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah tahun lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah, Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah, dan Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah, Review terhadap Rancangan Awal RKPD dan Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat.

BAB III : Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah
memuat perihal telaahan terhadap Kebijakan Nasional dan Provinsi Jawa Tengah, tujuan dan sasaran Renja Organisasi Perangkat Daerah , serta program dan kegiatan.

BAB IV : Penutup

BAB II

EVALUASI PELAKSANAAN RENJA ORGANISASI PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Organisasi Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Organisasi Perangkat Daerah

Tahun 2019 adalah merupakan tahap ke-empat dari pelaksanaan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Perhubungan Tahun 2016-2021 berdasarkan realisasi program dan kegiatan pelaksanaan Rencana Kerja (Renja) Tahun 2019. Review hasil evaluasi pelaksanaan Renja Dinas Perhubungan Tahun 2019, dan realisasi Renstra Dinas Perhubungan, mengacu pada hasil laporan kinerja tahunan Dinas Perhubungan.

Pada Tahun 2019, Dinas Perhubungan melaksanakan 10 program dengan 56 kegiatan. Berdasarkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan Kabupaten Pemalang Tahun 2019, Anggaran Belanja Dinas Perhubungan adalah sebesar Rp 9.049.211.000,00 dengan realisasi anggaran sebesar Rp 8.761.278.274,00 sehingga capaian realisasi adalah sebesar 96.82%.

Sedangkan untuk Pendapatan, dari 6 rekening pendapatan dengan total target anggaran pendapatan sebesar Rp 1.550.000.000,00 realisasi pendapatan adalah sebesar Rp 1.525.688.500,00 sehingga capaian realisasi pendapatan adalah 98.43%.

Berdasarkan sasaran strategis yang hendak dicapai, capaian realisasi anggaran dan kegiatan Tahun 2020 adalah sebagaimana tabel berikut :

Tabel 2.1
Pencapaian Sasaran Program dan Kegiatan Tahun 2019
Dinas Perhubungan

No	Sasaran Strategis	Jumlah Kegiatan	Prosentase Pelaksanaan	
			Target	Realisasi
1	Terwujudnya manajemen transportasi darat yang memadai guna mendukung keselamatan lalu lintas jalan	19	100,00%	100,00%
2	Meningkatnya pelayanan teknis pemeriksaan berkala kendaraan bermotor	02	100,00%	100,00%
3	Terwujudnya pembangunan dan pemeliharaan sarana, prasarana, dan fasilitas perhubungan	7	100,00%	100,00%
4	Meningkatnya pelayanan kepada masyarakat melalui terwujudnya tertib administrasi, sarana perkantoran dan prasarana yang mendukung, peningkatan kualitas SDM, dan sistem pelaporan yang memadai	26	100,00%	100,00%
Jumlah		54	100,00%	100,00%

Dengan demikian, maka rata-rata capaian kinerja Tahun 2019 Dinas Perhubungan Kabupaten Pematang Jaya adalah sebesar 100,00%. Pencapaian kinerja tersebut dilaksanakan melalui 9 program dengan 54 kegiatan yang secara garis besar dapat dijelaskan sebagai berikut :

- *Sasaran pertama*, yaitu terwujudnya manajemen transportasi darat yang memadai guna mendukung keselamatan lalu lintas jalan.
Rata-rata tingkat capaian kinerja mencapai 100,00%,.
- *Sasaran kedua*, yaitu meningkatnya pelayanan teknis pemeriksaan berkala kendaraan bermotor.
Tingkat capaian sasaran kinerja mencapai 100,00%. Kondisi ini menunjukkan tercapainya sasaran dari kegiatan yang telah ditetapkan dengan terwujudnya kondisi kerja sebagaimana yang diharapkan dalam pemeliharaan alat uji, kalibrasi dan perbaikan balai uji.
- *Sasaran ketiga*, yaitu terwujudnya pembangunan dan pemeliharaan sarana, prasarana, dan fasilitas perhubungan.

Tingkat pencapaian kinerja yang telah dicapai adalah 100,00%. Keberhasilan ini menunjukkan bahwa seluruh pelaksanaan kegiatan pemeliharaan prasarana perhubungan (pemeliharaan terminal) telah dilaksanakan seluruhnya.

- *Sasaran keempat*, yaitu meningkatnya pelayanan kepada masyarakat melalui terwujudnya tertib administrasi, sarana perkantoran dan prasarana yang mendukung, peningkatan kualitas SDM, dan sistem pelaporan yang memadai. Rata-rata tingkat pencapaian kinerja mencapai 100,00%. Tingkat keberhasilan pencapaian sasaran ini menunjukkan bahwa kegiatan sudah terlaksana secara optimal.

Lebih lanjut rekapitulasi evaluasi hasil pelaksanaan tahun 2018 dan perkiraan realisasi pencapaian renstra Perangkat Daerah sampai dengan tahun 2019 adalah sebagaimana tabel berikut :

Tabel 2.2

Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan Pencapaian Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Tahun 2019 Kabupaten Pemalang

Nama PD : **Dinas Perhubungan**

Kode Rekening	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Rancangan Renstra-PD)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s.d. Tahun 2018 (n-2)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2)			Target Program dan Kegiatan (Renja SKPD Tahun 2020 (n-1)	Realisasi Capaian Program dan Kegiatan (Renja SKPD Tahun 2020 (n-1)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s.d. Tahun Berjalan				
					Target Renja SKPD Tahun 2019 (n-2)	Realisasi Renja SKPD Tahun 2019 (n-2)	Tingkat Realisasi (%)			Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s.d. Tahun Berjalan 2020 (n-1)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)			
1			Urusan Wajib											
1	07		Bidang Urusan Perhubungan											
1	07	01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	<i>Tersedianya pelayanan administrasi perkantoran untuk meningkatkan kinerja terhadap kebutuhan</i>										
1	07	01	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Surat yang terkirim	17.500 surat	10.377 Surat	3.500 surat	3.500 surat	100,00	3.500 surat	3.500 surat	17.377 surat	100,00
1	07	01	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air, dan Listrik	Jenis sumber daya yang tercukupi	15 jenis	9 jenis	3 jenis, 12 bulan	3 jenis, 12 bulan	100,00	3 jenis	3 jenis	15 jenis	100,00
1	07	01	03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jasa peralatan dan perlengkapan yang tersedia	5 unit	3 unit	1 unit, 12 bulan	1 unit, 12 bulan	100,00	1 unit	1 unit	5 unit	100,00

1				2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	07	01	06	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/ Operasional	Jasa perizinan kendaraan dinas yang terlaksana	125 kendaraan	86 kend	38 kend	38 kend	100,00	38 kend	38 kend	168 kend	130,00
1	07	01	08	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Kebutuhan jasa kebersihan kantor	130 orang, 5 tahun	83 orang	26 orang, 12 bulan	26 orang, 12 bulan	100,00	26 orang	26 orang	135 orang	103,00
1	07	01	09	Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja	Kebutuhan perbaikan peralatan kerja	5 jenis, 5 tahun	3 jenis	1 jenis, 1 tahun	1 jenis, 1 tahun	100,00	1 jenis	1 jenis	5 jenis	100,00
1	07	01	10	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Tersedianya ATK	5 paket, 5 tahun	3 paket	1 paket	1 paket	100,00	1 paket	1 paket	5 paket	100,00
1	07	01	11	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Tersedianya barang cetakan	15 paket, 5 tahun	9 paket,	3 paket, 1 tahun	3 paket, 1 tahun	100,00	3 paket	3 paket	15 paket	100,00
1	07	01	12	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Tersedianya komponen listrik/penerangan	20 jenis, 5 tahun	12 jenis	4 jenis, 1 tahun	4 jenis, 1 tahun	100,00	4 jenis	4 jenis	20 jenis	100,00
1	07	01	13	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tersedianya peralatan kantor	-	-	-	-	0,00	-	-	-	-
1	07	01	15	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jenis bahan bacaan	10 jenis, 5 tahun	6 jenis,	2 jenis, 1 tahun	2 jenis, 1 tahun	100,00	3 jenis	3 jenis	10 jenis	100,00
1	07	01	16	Penyediaan Bahan Logistik	Jenis logistik	-	-	-	-	-	-	-	-	0
1	07	01	17	Penyediaan Makanan dan Minuman	Jenis makanan dan minuman	50 jenis, 5 tahun	30 jenis,	10 jenis, 1 tahun	10 jenis, 1 tahun	100,00	10 jenis	10 jenis	50 jenis	100,00
1	07	01	18	Rapat-rapat Konsultasi dan Koordinasi di Dalam dan ke Luar Daerah	Pelaksanaan rapat	850 kali, 5 tahun	500 kali	1 tahun	1 tahun	100,00	1 tahun	1 tahun	850 kali, 5 tahun	100,00
1	07	01	19	Penyediaan Jasa Keamanan	Jenis tenaga keamanan	155 jenis, 5 tahun	93 orang,	31 orang, 1 tahun	31 orang, 1 tahun	100,00	31 orang, 1 tahun	31 orang, 1 tahun	155 orang, 5 tahun	100,00

1				2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	07	02		Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	<i>Meningkatnya sarana prasarana aparatur untuk menunjang peningkatan kinerja terhadap kebutuhan</i>									
1	07	02	05	Pengadaan Kendaraan Dinas/ Operasional	Kendaraan Dinas Roda 4	1 kend	3 kend	2 kend	2 kend	100,00	2 kend	2 kend	6 kend	500,00
1	07	02	07	Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	Tempat sampah, AC, gerobak tarik, TV, Kamera, HP)	11 jenis	6 jenis	2 jenis	2 jenis	100,00	2 jenis	2 jenis	11 jenis, 5 tahun	100,00
1	07	02	10	Pengadaan Mebeler	Meja, kursi	58 unit, 15 jenis	6 jenis	3 jenis	3 jenis	100,00	3 jenis	3 jenis	12 jenis	20,00
1	07	02	11	Pengadaan Komputer dan Perlengkapannya	Komputer PC, Laptop, Printer, mesin ketik	2 jenis	2 jenis	1 jenis	1 jenis	100,00	1 jenis	1 jenis	4 jenis	200,00
1	07	02	22	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Pemeliharaan gedung kantor	10 gedung, 5 tahun	6 unit	2 unit, 1 tahun	2 unit, 1 tahun	100,00	2 unit, 1 tahun	2 unit, 1 tahun	10 gedung, 5 tahun	100,00
1	07	02	24	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Pemeliharaan kendaraan dinas/operasional	130 kend	119 kend	38 kend	38 kend	100,00	38 kend	38 kend	152 kend	120,77
1	07	02	26	Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor	Pemeliharaan perlengkapan gedung kantor	5 jenis, 5 tahun	4 jenis	3 jenis, 1 tahun	3 jenis, 1 tahun	100,00	3 jenis, 1 tahun	3 jenis, 1 tahun	9 jenis, 4 tahun	180,00
1	07	02	28	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor	Pemeliharaan peralatan gedung kantor	-	-	-	-	00,00	-	-	-	00,00
1	07	02	29	Pemeliharaan Rutin/Berkala Mebeleur	Pemeliharaan mebeleur	4 paket, 5 tahun	2 paket	1 tahun	1 tahun	100,00	1 tahun	1 tahun	4 paket, 4 tahun	100,00
1	07	02	30	Pemeliharaan Rutin/Berkala Komputer dan perlengkapannya	Pemeliharaan komputer dan perlengkapannya	172 unit	104 unit	47 unit	47 unit	100,00	47 unit	47 unit	198 unit	115,00
1	07	02	44	Rehab Sedang/Berat Kendaraan Dinas/Operasional	Kendaraan yang direhab	-	-	-	-	00,00	-	-	-	00,00

1				2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	07	03		Program Peningkatan Disiplin Aparatur	<i>Terwujudnya peningkatan disiplin aparatur</i>									
1	07	03	02	Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya	Jumlah pakaian dinas yang tercukupi	-	10 paket	10 paket	10 paket	100,00	10 paket	10 paket	0 paket	100,00
1	07	05		Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	<i>Terwujudnya peningkatan kapasitas sumber daya aparatur</i>									
1	07	05	04	Pelatihan Teknis Pelaksanaan Tupoksi PD	Personil yang mengikuti kegiatan	250 orang	141 orang	91 orang	91 orang	100,00	100 orang	100 orng	241 orang	85,60
1	07	06		Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	<i>Tersusunnya laporan capaian kinerja dan keuangan lima tahunan</i>									
1	07	06	01	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja PD	Tersusunnya laporan capaian kinerja PD (19 laporan, 4 buku)	110 laporan	62 laporan	31 laporan	31 laporan	100,00	31 laporan	31 laporan	124 laporan	112,00
1	07	06	02	Penyusunan Pelaporan Keuangan Semesteran	Tersusunnya laporan keuangan semesteran	5 laporan	3 laporan	1 laporan	1 laporan	100,00	1 laporan	1 laporan	5 laporan	100,00
1	07	06	04	Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun	Tersusunnya laporan keuangan PD	5 laporan	2 laporan	1 laporan	1 laporan	100,00	1 laporan	1 laporan	4 laporan	100,00
1	07	06	09	Monitoring, Evaluasi, dan Pelaporan	Tersusunnya laporan hasil monev	25 laporan	15 laporan	7 laporan	7 laporan	100,00	7 laporan	7 laporan	29 laporan	116,00
1	07	09		Program Peningkatan Perencanaan dan Penganggaran PD	<i>Terwujudnya peningkatan perencanaan dan penganggaran PD</i>	100%								
1	07	09	02	Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Penganggaran SKPD	Jumlah dokumen perencanaan yang tersusun	35 dokumen	14 dokumen	6 dokumen	6 dokumen	100,00	6 dokumen	6 dokumen	35 dokumen,	100,00
1	07	15		Program Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan	<i>Terwujudnya pembangunan prasarana dan fasilitas perhubungan</i>	100%								
1	07	15	01	Perencanaan Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan	Kebutuhan prasarana dan fasilitas perhubungan	-	-	-	-	-	-	-	-	-

1				2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	07	15	02	Penyusunan Kebijakan, Norma, Standar dan Prosedur bidang Perhubungan	SOP Dinas Perhubungan	5 kegiatan, 5 tahun	3 kgt	1 kgt	1 kgt	100,00	1 kgt	1 kgt	5 kgt	100,00
1	07	15	03	Koordinasi dalam Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan	Laporan pelaksanaan koordinasi bidang perhubungan	5 kegiatan, 5 tahun	3 kgt	1 kgt	1 kgt	100,00	1 kgt	1 kgt	5 kgt	100,00
1	07	15	04	Sosialisasi Kebijakan di Bidang Perhubungan	Sosialisasi bidang perhubungan	10 kegiatan, 5 tahun	6 kgt	2 kgt	2 kgt	100,00	2 kgt	2 kgt	10 kgt	100,00
1	07	15	07	Peningkatan Pengelolaan Terminal Angkutan Darat	Kegiatan pembinaan teknis terminal	10 kegiatan, 5 tahun	8 kgt,	1 kgt	1 kgt	100,00	1 kgt,	1 kgt	10 kgt	100,00
1	07	15	10	Peningkatan Pengelolaan Parkir di Tepi Jalan	Pembinaan teknis pada sector perparkiran	5 kegiatan	6 kgt	2 kgt	2 kgt	100,00	2 kgt	2 kgt	8 kgt	140,00
1	07	15	11	Inventarisasi Data Sarana, Prasarana dan Fasilitas Perhubungan	Inventarisasi data kinerja perhubungan	5 kegiatan	3 kgt	1 kgt	1 kgt	100,00	1 kgt	1 kgt	5 kgt	100,00
1	07	15	12	Pembangunan prasarana dan fasilitas perhubungan	Tersedianya terminal angkutan penumpang		3 kgt	1 kgt	1 kgt	100,00	1 kgt	1 kgt	5 kgt	100,00
1	07	16		Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas LLAJ	<i>Prasrana dan fasilitas perhubungan yang terpelihara dengan baik</i>	<i>100%</i>								
1	07	16	01	Rehabilitasi/Pemeliharaan Sarana Alat Pengujian Kendaraan Bermotor	Terpeliharanya alat uji kendaraan bermotor	10 kgt, 5 tahun	6 kgt	1 kgt	1 kgt	100,00	1 kgt	1 kgt	10 kgt	100,00
1	07	16	02	Rehabilitasi/Pemeliharaan Balai Pengujian Kendaraan Bermotor	Terpeliharanya balai uji kendaraan bermotor	5 gedung	3 gedung	1 gedung	1 gedung	100,00	1 gedung	1 gedung	5 gedung	100,00
1	07	16	04	Rehabilitasi/Pemeliharaan Terminal/Pelabuhan	Terpeliharanya terminal	8 terminal	4 terminal	-	-	0,00	-	-	4 terminal	45,00

1	07	16	05	Rehabilitasi/Pemeliharaan Rambu-rambu Lalu Lintas	Terpeliharanya rambu lalu lintas	20 jenis, 5 tahun	12 jenis	4 jenis,	4 jenis	100,00	4 jenis	4 jenis	20 jenis	100,00
1	07	16	08	Rehabilitasi/pemeliharaan Halte	Pengembangan Halte dan shelter	5 kegiatan	3 kgt	1 kgt	1 kgt	100,00	1 paket	1 paket	5 kgt	100,00
1	07	16	09	Rehabilitasi/pemeliharaan Sarana dan Prasarana Perlintasan KA	Pos jaga perlintasan	10 jenis	6 jenis	2 jenis	2 jenis	100,00	2 jenis	2 jenis	10 jenis	100,00
1	07	17		Program Peningkatan Pelayanan Angkutan	<i>Meningkatnya pelayanan angkutan</i>	<i>100%</i>								
1	07	17	01	Kegiatan Penyuluhan bagi para Sopir/Juru Mudi untuk Keselamatan Penumpang	Kegiatan penyuluhan	-	-	-	-	-	-	-	-	00,00
1	07	17	03	Kegiatan Temu Wicara Pengelola Angkutan Umum Guna Meningkatkan Keselamatan Penumpang	Temu wicara pengelola angkutan umum	2 kegiatan	-	-	-	00,00	-	-	-	00,00
1	07	17	04	Kegiatan Uji Kelayakan Sarana Transportasi guna Keselamatan Penumpang	Terlaksananya pemeriksaan kelaikan jalan kendaraan	5 kgt, 5 tahun	3 kgt	2 kgt	2 kgt	100,00	2 kgt	2 kgt	5 kgt	100,00
1	07	17	05	Kegiatan Pengendalian Disiplin Pengoperasian Angkutan Umum	Terlaksananya operasi laik jalan	150 kali, 5 tahun	90 kali	30 kali, 1 tahun	30 kali, 1 tahun	100,00	30 kali, 1 tahun	30 kali, 1 tahun	150 kali, 4 tahun	100,00

1				2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	07	17	06	Kegiatan Penciptaan Keamanan dan Kenyamanan Penumpang di Lingkungan Terminal	Pelaksanaan pengamanan di lingkungan terminal	11 kegiatan	7 kgt	3 kgt	3 kgt	100,00	3 kgt	3 kgt	11 kegiatan	100,00
1	07	17	09	Kegiatan Penciptaan Disiplin dan Pemeliharaan Kebersihan di Lingkungan Terminal A	Terlaksanannya pemeliharaan kebersihan terminal	35 jenis	26 terminal	4 terminal, 1 tahun	4 terminal, 1 tahun	100,00	4 terminal, 1 tahun	4 terminal, 1 tahun	35 terminal, 5 tahun	100,00
1	07	17	11	Pengumpulan dan Analisis Data Base Pelayanan Angkutan	Terlaksananya kegiatan analisis jaringan trayek	5 kegiatan	3 kegiatan	1 kgt, 1 dokumen	1 kgt, 1 dokumen	100,00	1 dokumen	1 dokumen	5 kegiatan, 5 dokumen	100,00
2	09	17	12	Pengembangan sarana dan prasarana pelayanan jasa angkutan	Terlaksananya kegiatan pengembangan sarana dan prasarana pelayanan jasa angkutan	5 kegiatan	3 kegiatan	1 kgt, 12 bulan	1 kgt, 12 bulan	100,00	1 kegiatan	1 kegiatan	4 kgt	100,00
1	07	17	13	Fasilitasi Perijinan di Bidang Perhubungan	Pelayanan perijinan angkutan bidang perhubungan	5 kegiatan	3 kgt	1 kgt, 12 bulan	1 kgt, 12 bulan	100,00	1 kegiatan	1 kegiatan	4 kgt, 60 bulan	100,00
1	07	17	14	Sosialisasi/Penyuluhan Ketertiban Lalu Lintas dan Angkutan	Terlaksananya pemilihan dan pengiriman pelajar pelopor keselamatan lalu lintas jalan	5 kegiatan	1 kegiatan	-	-	00,00	-	-	1 kegiatan	20,00
1	07	17	15	Kegiatan Pemilihan dan Pemberian Penghargaan Sopir/Juru Mudi/Awak Angkutan Umum Teladan	Terlaksananya pemilihan dan pengiriman peserta AKUT ke tingkat provinsi	5 kegiatan	3 kegiatan	1 kgt, 20 peserta	1 kgt, 20 peserta	100,00	1 kgt, 20 peserta	1 kgt, 20 peserta	5 kegiatan, 100 peserta	100,00
1	07	17	16	Koordinasi dalam Peningkatan Pelayanan Angkutan	Terlaksananya koordinasi peningkatan angkutan umum	5 kegiatan	3 kgt	1 kgt	1 kgt	100,00	1 kgt	1 kgt	5 kegiatan	100,00
1	07	17	18	Kegiatan Penciptaan Disiplin dan Pemeliharaan Kebersihan di Lingkungan Terminal B	Terlaksananya pemeliharaan kebersihan terminal	20 terminal	12 terminal	4 terminal, 1 tahun	4 terminal, 1 tahun	100,00	4 terminal, 1 tahun	4 terminal, 1 tahun	16 terminal	100,00

1	07	17	19	Sosialisasi Peningkatan Keselamatan Transportasi Jalan	Terlaksananya sosialisasi/pembinaan ketertiban dan keselamatan lalu lintas jalan	-	-	-	-	-	-	-	00,00
1	07	18		Program Pembangunan Sarana dan Prasarana Perhubungan	<i>Terlaksananya pembangunan sarana dan prasarana perhubungan</i>	<i>100%</i>							
1	07	18	01	Pembangunan Gedung Terminal	Tersediannya pembangunan terminal angkutan barang	1 kegiatan, 10 dok	1 kgt	-	-	00,00	-	1 kgt, 1 dokumen	80,00

1				2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	07	18	06	Pengadaan Sarana dan Prasarana Perkeretaapian	Pintu Perlintasan KA	-	-	1	1	100,00	-	-	-	40,00
1	07	19		Program Pengendalian dan Pengamanan Lalu Lintas	<i>Meningkatnya ketertiban masyarakat berlalu lintas</i>	<i>100%</i>								
1	07	19	01	Pengadaan Rambu-rambu Lalu Lintas	Tersediannya rambu lalu lintas	10 kegiatan	6 kgt	3 kgt	3 kgt	100,00	2 kgt	2 kgt	10 kgt	100,00
1	07	19	02	Pengadaan Marka Jalan	Terbuatnya marka jalan	5 paket, 5 tahun	3 paket	1 paket	1 paket	100,00	3 paket	3 paket	5 paket	100,00
1	07	19	04	Pengadaan Sarana dan Prasarana Perlengkapan Jalan	Tersediannya sarana dan prasarana perlengk jalan	10 jenis, 5 tahun	6 jenis	2 jenis	2 jenis	100,00	2 jenis	2 jenis	10 jenis	100,00
1	07	19	05	Pengendalian dan Pengamanan Lalu Lintas di Jalan	Terlaksananya pengamanan lalu lintas	10 kgt, 5 tahun	6 kgt	3 kgt	3 kgt	100,00	3 kegiatan	3 kegiatan	10 kgt	80,00
1	07	19	06	Koordinasi dalam Peningkatan Pengendalian dan Pengamanan Lalu Lintas	terlaksananya kegiatan analisis jaringan trayek	25 kali, 5 tahun	15 kgt	5 kali	5 kali	100,00	5 kali	5 kali	25 kgt	100,00

Pada tahun 2019 Dinas Perhubungan Kabupaten Pematang Mendauh mendapatkan Anggaran Belanja sebesar Rp 9.049.211.000,00 untuk melaksanakan 53 kegiatan dengan realisasi anggaran mencapai 96,82% dengan capaian program 100%.

Pada sektor belanja dari Dinas Perhubungan Kabupaten Pematang Mendauh Tahun Anggaran 2019 masih terdapat 5 (lima) kegiatan dimana capaian realisasi belanja masih di bawah target (85%). Hal ini dikarenakan adanya efisiensi pelaksanaan kegiatan, maupun karena pelaksanaan kegiatan yang kurang tepat, sehingga tidak sesuai dengan DPA yang ada.

Adapun kendala teknis yang dihadapi yang menyebabkan tidak terserapnya anggaran belanja adalah sebagai berikut :

1. *Penyediaan makanan dan minuman*

Capaian realisasi 77,53%, Belanja minuman harian pegawai tidak terserap maksimal karena banyak personil Dishub yang melakukan PAM di Jalan raya.

2. *Pengadaan perlengkapan gedung kantor*

Capaian realisasi 61,34%. Belanja monitor CCTV sudah dilaksanakan di bidang Lalu lintas.

3. *Pengadaan mebeleur*

Realisasi anggaran sebesar 82,15 % , Pada belanja mebeleur ada belanja perjalanan dinas luar daerah yang tidak terserap, disebabkan pembelian mebeleur yang direncanakan diluar kota, namun pelaksanaannya pembelian mebeleur di dalam kota pematang mendauh sehingga belanja perjalanan dinas tidak terserap.

4. *Pengadaan komputer dan perlengkapannya*

Capaian realisasi 78,64%. Pengadaan laptop untuk MPP tidak di belanjakan karena tempat pelayanan belum siap.

5. *Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor*

Pada kegiatan Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor serapannya sebesar 80,71 % Peralatan gedung kantor yang seharusnya di pelihara masih dalam kondisi baik sehingga biaya pemeliharaan peralatan perlengkapan gedung tidak terserap maksimal.

Informasi di atas diharapkan dapat dijadikan catatan dalam pengambilan keputusan terutama untuk perencanaan kegiatan pada tahun-tahun yang akan datang, sehingga seluruh kegiatan dapat berjalan dengan baik memenuhi target kinerja yang diharapkan.

Diperlukan adanya kerja sama dan koordinasi yang baik antar bidang dan sekretariat terutama dalam penatausahaan keuangan dan pelaksanaan kegiatan, sehingga dalam penyusunan anggaran dan pelaksanaan kegiatan dapat berjalan sesuai rencana dan sesuai dengan DPA.

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Bahwa Dinas Perhubungan pada dasarnya mengampu satu bidang urusan yaitu urusan Perhubungan maka sesuai dengan urusan yang dibebankan tersebut maka Dinas Perhubungan berdasarkan kewenangannya mempunyai tugas dan fungsi sebagai berikut :

1. Kewenangan, Tugas Pokok, dan Fungsi

a. Kewenangan

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pemalang, bahwa kewenangan desentralisasi yang ada pada Dinas Perhubungan Kabupaten Pemalang adalah Bidang Perhubungan.

b. Tugas Pokok

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Dinas Perhubungan Kabupaten Pemalang merupakan unsur pelaksanaan Pemerintah Kabupaten di bidang perhubungan yang dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah Kabupaten Pemalang, berdasarkan Peraturan Bupati Pemalang Nomor 62 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Perhubungan Kabupaten Pemalang.

Tugas Pokok Dinas Perhubungan Kabupaten Pematang Jaya adalah melaksanakan urusan pemerintahan di bidang perhubungan.

c. Fungsi

Didalam melaksanakan tugas pokok tersebut, Dinas Perhubungan mempunyai fungsi :

- a. Perumusan kebijakan sesuai dengan lingkup tugasnya,
- b. Pelaksanaan kebijakan sesuai dengan lingkup tugasnya,
- c. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan sesuai dengan lingkup tugasnya,
- d. Pelaksanaan administrasi dinas sesuai dengan lingkup tugasnya,
- e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

Dinas Perhubungan Kabupaten Pematang Jaya merupakan salah satu dinas daerah yang mempunyai tugas pokok “Melaksanakan kewenangan desentralisasi di bidang perhubungan”, oleh karena itu sesuai dengan tugas dan fungsinya Dinas Perhubungan Kabupaten Pematang Jaya harus dapat memberikan pelayanan umum sebaik-baiknya kepada masyarakat baik pelayanan administratif maupun pelayanan teknis guna menunjang keberhasilan penyelenggaraan pemerintahan daerah.

2. Pelayanan

Berdasarkan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 81 Tahun 2011 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Perhubungan Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota, pelayanan yang dapat diberikan Dinas Perhubungan Kabupaten Pematang Jaya meliputi :

a. Jaringan Pelayanan Angkutan Jalan

Dinas Perhubungan Kabupaten Pematang Jaya telah menyediakan pelayanan Angkutan Umum yang melayani wilayah yang telah tersedia jaringan jalan dan jaringan trayek berupa Angkutan Perkotaan (137 kendaraan dalam 10 trayek), Angkutan Perdesaan (325 kendaraan dalam 20 trayek), Angkutan Perbatasan (30 kendaraan dalam 3 trayek). Selain itu juga tersedia bus yang melayani antar kota berupa Angkutan Antar Kota Dalam Provinsi (AKDP), dan Angkutan Kota Antar Provinsi (AKAP).

Perizinan yang dikeluarkan oleh Dinas Perhubungan Kabupaten Pemalang terdiri dari Izin Trayek dan Izin Insidentil. Angkutan Umum dalam trayek yang ada di Kabupaten Pemalang adalah sebagai berikut :

1) Angkutan Perkotaan

No	Trayek	Jumlah
1.	A : Terminal Induk – Sumberharjo PP	11
2.	B : Terminal Induk – Petarukan PP	26
3.	C : Terminal Induk – Widuri PP	8
4.	D : Terminal Induk – Sumberharjo PP	9
5.	E : Terminal Induk – Petarukan PP	25
6.	F : Terminal Induk – Sungapan PP	6
7.	G : Terminal Induk – Banjarmulya PP	10
8.	G1 : Terminal Induk – Banjarmulya PP	13
9.	H : Terminal Induk – Loning PP	14
10.	I : Terminal Induk – Jebed PP	15

2) Angkutan Perdesaan

No	Trayek	Jumlah
Berpusat di Petarukan :		
1.	Petarukan – Karangasem – Comal PP	11
2.	Klareyan – Petarukan – Pener PP	21

No	Trayek	Jumlah
Berpusat di Comal :		
1.	Comal – Tegalsari – Banjardawa PP	18
2.	Comal – Kaliwadas – Cikadu PP	20
3.	Comal – Pesantren – Petarukan PP	25
4.	Comal – Kaliprau – Blendung PP	10
5.	Comal – Pamutih – Blendung PP	15
6.	Comal – Mojo – Blendung PP	15
7.	Comal – Kebojongan PP	6
8.	Comal – Bodeh – Kesesi PP	
Berpusat di Randudongkal :		
1.	Randudongkal – Tanahbaya PP	29
2.	Randudongkal – Bantabolang PP	10
3.	Randudongkal – Watukumpul PP	10
4.	Randudongkal – Warungpring PP	33

5.	Randudongkal – Belik – Cikadu PP	25
6.	Randudongkal – Kecepit- Moga PP	17
Berpusat di Moga :		
1.	Moga – Karang Sari – Simpar PP	10
2.	Moga – Pulosari – Belik PP	8
3.	Moga – Mandiraja – Warungpring PP	10
Berpusat di Bantarbolang :		
1.	Bantarbolang – Kuta - Ps. Pagi PP	12
2.	Bantarbolang – Kesesirejo PP	10
3.	Bantarbolang – Kebongede – Ps. Pagi PP	4

Sedangkan perizinan yang dikeluarkan adalah sebagai berikut :

No	Jenis Perizinan	Tahun 2018
1.	Izin Trayek	62
2.	Izin Insidentil	0
Jumlah		62

Dibanding tahun sebelumnya, permintaan Izin Insidentil berkurang, hal ini dapat disebabkan karena sudah banyak masyarakat yang menggunakan bus pariwisata maupun kendaraan pribadi dalam bepergian untuk keperluan wisata maupun keluarga.

Disamping telah tersedia angkutan umum dalam trayek, di Kabupaten Pematang Jaya terdapat angkutan tidak dalam yang terdiri dari

1) angkutan taksi

pada Tahun 2016 di Kabupaten Pematang Jaya telah direalisasikan mobil penumpang berupa taksi untuk melayani masyarakat yang membutuhkan taksi. Saat ini baru terealisasi sebanyak 4 unit kendaraan dari rencana target sebanyak 30 unit, melihat kondisi kebutuhan masyarakat.

2) angkutan barang untuk penumpang

angkutan ini melayani daerah-daerah terpencil (pegunungan) dengan daerah-daerah yang telah berkembang (ibukota kecamatan) berupa kendaraan angkutan barang. Hal ini karena kultur/kebiasaan masyarakat setempat yang masih membutuhkan angkutan barang sebagai angkutan penumpang. Daerah-daerah yang masih terdapat angkutan barang sebagai angkutan penumpang antara lain di daerah : Watukumpul, Belik, Pulosari, Moga, Warungpring, Randudongkal, dan Bantarbolang.

b. Jaringan Prasarana Angkutan Jalan

Dinas Perhubungan Kabupaten Pemalang menyediakan prasarana/fasilitas angkutan jalan berupa : halte, shelter dan terminal.

Untuk tahun 2019 jumlah halte 21 buah, shellter 3 buah dengan kondisi baik. Sedangkan jumlah terminal penumpang yang ada sebanyak 8 buah, terdiri dari :

Terminal Randudongkal, Terminal Moga, Terminal Belik, Terminal Warungpring, Terminal Angkot Pemalang, Terminal Petarukan, dan Terminal Comal dan Terminal Grosir Comal

Agar dapat tetap berfungsi dengan baik, diperlukan adanya pelaksanaan kegiatan pemeliharaan terminal dan peningkatan fungsi terminal.

c. Fasilitas Perlengkapan Jalan

Guna mendukung keselamatan transportasi jalan, Dinas Perhubungan melaksanakan kegiatan-kegiatan berupa Pengadaan Rambu-rambu Lalu Lintas, Pengadaan Marka Jalan, Pengadaan Sarana dan Prasarana Perlengkapan Jalan, Pengadaan Sarana dan Prasarana Perkeretaapian, dan Pemeliharaan Rambu-rambu Lalu Lintas.

Fasilitas perlengkapan jalan yang telah dipasang Dinas Perhubungan Kabupaten Pemalang baik di jalan Kabupaten, jalan Provinsi, maupun jalan Nasional adalah sebagai berikut :

No	Jenis Fasilitas dan Perlengkapan Jalan	Sampai dengan Tahun					
		2014	2015	2016	2017	2018	2019
1.	RPPJ	25	50	16	150	24	-
2.	Rambu R-60	51	50	230	1370	-	118
3.	Rambu R-40	-	-	-	-	-	-
4.	Rambu R-45	-	-	-	45	-	-
5.	Rambu R-90	6	-	-	6	-	-
6.	Rambu Penunjuk Jurusan	-	-	-	21	-	-
7.	Rambu Petunjuk Jalur Alternatif	-	-	-	48	-	-
8.	Rambu Sementara	-	-	-	25	-	-
	Rambu Elektronik	-	-	-	1	-	-
9.	Papan Nama Jalan	-	-	-	122	-	-
10.	Rambu Himbauan	-	-	-	3	-	10
11.	Delineator	-	-	-	90	-	-
12.	Guardrail	388	-	1	490 beam	-	-
13.	Cermin Tikungan	10	9	14	25	-	-
14.	Marka Jalan	1.144	255	666 m2	8476 m2	436 m2	1731 m2
15.	Halte	-	-	15	14	2	3
16.	Shelter			3	-	-	-
17.	Traffic Light	4	1	-	15	1	2
18.	Warning Light	4	7	4	40	-	5
19.	Countdown Timer	-	-	1	12	-	-
20.	Pita Kejut	-	-	-	6	3	-
21.	Pintu Perlintasan KA	-	-	-	3	1	2

Selain kegiatan yang telah dilakukan seperti tersebut di atas, masih banyak hal-hal yang perlu dilakukan untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dari Dinas Perhubungan Kabupaten Pemalang, mengingat masih adanya kekurangan atau hal-hal yang harus dilakukan, antara lain :

- kondisi APILL (traffic light) yang sudah tua memerlukan adanya penggantian. Berhubungan terletak pada jalan nasional dan provinsi pelaksanaan pembangunan/rehabilitasi penggantian APILL menjadi sulit, memerlukan koordinasi yang lebih baik.
- sudah pudar/hilangnya marka jalan dan *zebracross*, terutama yang terdapat di jalan-jalan protokol ibukota kabupaten dan di depan sekolah-sekolah;

- kurang tertibnya parkir yang ada di badan jalan, di jalan-jalan protokol yang melalui kawasan/pusat perdagangan di ibukota kabupaten;
- masih kurangnya rambu-rambu lalu lintas untuk jalan-jalan kabupaten yang menghubungkan antar kecamatan di wilayah Kabupaten Pemalang, mengingat kondisi geografis Kabupaten Pemalang bagian Selatan yang berupa dataran tinggi banyak memerlukan rambu lalu lintas sebagai petunjuk dan peringatan bagi para pengguna jalan demi keamanan dan keselamatan berlalu lintas;
- hilangnya beberapa rambu lalu lintas yang telah dipasang, karena kurangnya pengertian masyarakat akan arti pentingnya rambu lalu lintas bagi pengguna jalan.
- masih banyak dibutuhkan pengaman jalan khususnya di wilayah bertebing curam dan tanjakan maupun penurunan jalan yang tajam;
- perlunya koordinasi dalam pembangunan dan peningkatan keselamatan lalu lintas pada perlintasan sebidang.
- Belum adanya masterplan lalu lintas di Kabupaten Pemalang, sehingga pemasangan rambu lalu lintas hanya berdasarkan pada hal yang mendesak dan penggantian rambu yang sudah ada

d. Pelayanan Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor

Untuk mengetahui kondisi laik/tidaknya kendaraan bus/barang yang akan beroperasi di jalan dan sebagai kelengkapan kendaraan, Dinas Perhubungan Kabupaten Pemalang memberikan pelayanan teknis berupa Pemeriksaan/Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor.

Jumlah Kendaraan Bermotor Wajib Uji (KBWU) di wilayah Kabupaten Pemalang pada Tahun 2019 sudah mencapai 8.554 lebih kendaraan. Oleh karena itu, maka Dinas Perhubungan Kabupaten Pemalang melaksanakan pelayanan pengujian berkala kendaraan bermotor dengan prasarana berupa 1 gedung balai pengujian kendaraan bermotor dan sarana berupa 9 set alat pengujian kendaraan bermotor. Untuk menjamin kelancaran dan seakuratan

peralatan uji tersebut, dilakukan kegiatan pemeliharaan dan kalibrasi alat uji.

Selain kegiatan di atas, hal yang juga penting adalah diperlukannya suatu sistem informasi manajemen yang mendukung kinerja pengujian kendaraan bermotor berupa software atau aplikasi penyimpanan data pengujian kendaraan bermotor. Pada akhir tahun 2014, Dinas Perhubungan memperoleh bantuan software pengujian kendaraan bermotor. Hal ini sangat membantu dalam penyusunan pelaporan pengujian kendaraan bermotor. Diharapkan pada tahun 2018 dapat berfungsi dengan baik.

Dari jumlah kendaraan yang melakukan uji berkala tersebut, diperoleh data jumlah KBWU dan Kendaraan yang melakukan uji berkala di Dinas Perhubungan Kabupaten Pemalang sebagai berikut :

Jenis Kendaraan	KBWU						Kendaraan yang Diuji					
	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Mobil Barang	4,935						8,789	10,728	10,955	10,880		11,830
Bus	815						1,244	1,154	1,078	1,173		943
Jumlah	5,750	6,098	5,158	7,560	7,489	8,544	10,033	11,882	12,033	12,053	11,704	12,773

Untuk satu kali Pemeriksaan/Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor berlaku untuk 6 (enam) bulan, sehingga dalam satu tahunnya dilakukan dua kali pengujian terhadap masing-masing kendaraan.

Dari semua kendaraan yang diuji tersebut, dapat diperoleh data Tahun 2019 bahwa di Kabupaten Pemalang terdapat 8.544 Kendaraan Bermotor Wajib Uji, dan yang melakukan uji berkala 12.773 kendaraan atau sebanyak 108,25% dari target yang ditetapkan sebanyak 11.800 uji KiR kendaraan yang melaksanakan wajib uji di Dinas Perhubungan Kabupaten Pemalang, angka prosentase tersebut menunjukkan bahwa target pelaksanaan uji kendaraan tercapai/over target dari jumlah target kendaraan yang telah ditetapkan di Tahun 2019.

Dari capaian tersebut dapat disimpulkan bahwa kesadaran masyarakat untuk memenuhi kewajibannya dalam pengujian kendaraan sangat tinggi.

e. Sumber Daya Manusia (SDM)

Untuk menunjang pelayanan bidang perhubungan pada umumnya diperlukan Sumber Daya Manusia (SDM) yang memadai dan handal agar dapat memberikan pelayanan lebih baik. Jumlah SDM bidang perhubungan, berdasarkan SPM ini terdiri dari :

- 1) Unit Terminal Penumpang dan Perpustakaan (UTPP) dari 1 unit terminal tipe B, 7 unit sub terminal dan Perpustakaan yang ada, SDM yang bertugas sebanyak 37 orang;
- 2) Bidang Pengujian Kendaraan Bermotor. Pada seksi Pengujian Kendaraan Bermotor SDM yang ada terdiri dari 4 orang Penguji, 2 orang petugas Administrasi/Teknis Pengujian, dan 3 orang petugas Pendukung Teknis Pengujian.
- 3) Bidang MRL, Evaluasi Andalalin terdiri dari : 2 orang yang bertugas dalam bidang MRL dan Evaluasi Andalalin.
- 4) Pengawas Kelaikan Jalan. SDM yang bertugas sebagai pengawas kelaikan jalan berjumlah 2 orang, sayangnya masih belum memiliki kompetensi dalam hal pengawasan kelaikan jalan. Oleh karena itu sangat diperlukan adanya pelatihan teknis untuk diklat PPNS bidang Perhubungan.

f. Keselamatan

Saat ini, Dinas Perhubungan Kabupaten Pemalang belum menetapkan standar keselamatan bagi angkutan umum yang melayani trayek yang ada. Untuk keselamatan di jalan terutama pada perlintasan sebidang dengan KA, Dinas Perhubungan sudah mengadakan peningkatan sarana pengamanan perlintasan KA dari yang semula bambu menjadi pintu perlintasan semi otomatis. Untuk peningkatan keselamatan di perlintasan sebidang sedang diupayakan koordinasi dengan Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Tengah.

Tabel 2.3
Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah (Dinas Perhubungan)
Kabupaten Pemalang

No.	Indikator	SPM/ Standar Nasional	IKK	Target Renstra DISHUB				Realisasi Capaian (%)		Proyeksi (%)		Catatan Analisis
				Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021	
1	2	3	4	6	7	8	8	9	10	11	12	13
1	surat yang terkirim dengan baik			3.500 surat	3.500 surat	3.500 surat	3.500 surat	100,00	100,00	100,00	100,00	
2	sumber daya yang tercukupi			3 jenis	3 jenis	3 jenis	3 jenis	100,00	100,00	100,00	100,00	
3	Jasa peralatan dan perlengkapan kantor yang tersedia			1 unit	1 unit	1 unit	1 unit	100,00	100,00	100,00	100,00	
4	jumlah perizinan kendaraan dinas			25 unit	25 unit	25 unit	25 unit	100,00	100,00	100,00	100,00	
5	jumlah petugas kebersihan			26 orang, 2 jenis	26 orang, 2 jenis	26 orang, 2 jenis	26 orang, 2 jenis	100,00	100,00	100,00	100,00	
6	jerbaikan peralatan kerja			1 jenis, 1 tahun	1 jenis, 1 tahun	1 jenis, 1 tahun	1 jenis, 1 tahun	100,00	100,00	100,00	100,00	
7	kebutuhan atk			1 paket, 1 tahun	1 paket, 1 tahun	1 paket, 1 tahun	1 paket, 1 tahun	100,00	100,00	100,00	100,00	
8	kebutuhan barang cetakan			3 paket	3 paket	3 paket	3 paket	100,00	100,00	100,00	100,00	
9	kebutuhan komponen listrik			4 jenis	4 jenis	4 jenis	4 jenis	100,00	100,00	100,00	100,00	
10	kebutuhan bahan bacaan			2 jenis	2 jenis	2 jenis	2 jenis	100,00	100,00	100,00	100,00	
11	kebutuhan makanan minuman			10 jenis	10 jenis	10 jenis	10 jenis	100,00	100,00	100,00	100,00	
12	Rapat-rapat yang dapat dihadiri			170 kali, 1 tahun	170 kali, 1 tahun	170 kali, 1 tahun	170 kali, 1 tahun	100,00	100,00	100,00	100,00	
13	kebutuhan jasa keamanan			31 orang ,1 jenis	31 orang ,1 jenis	31 orang ,1 jenis	31 orang ,1 jenis	100,00	100,00	100,00	100,00	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
14	Tersedianya kendaraan dinas			1 unit	-	-	-	100,00	-	-	-	
15	Tersedianya perlengkapan gedung kantor			2 jenis	2 jenis	2 jenis	2 jenis	100,00	100,00	100,00	100,00	
16	Tersedianya mebeleur			3 jenis	3 jenis, 58 unit	3 jenis	3 jenis	100,00	100,00	100,00	100,00	
17	Tersedianya komputer dan perlengkapannya			2 jenis	2 jenis	2 jenis	2 jenis	100,00	100,00	100,00	100,00	
18	Terpeliharanya gedung kantor			2 gedung	2 gedung	2 gedung	2 gedung	100,00	100,00	100,00	100,00	
19	Terpeliharanya kendaraan dinas			1 tahun, 26 kend	1 tahun, 26 kend	1 tahun, 26 kend	1 tahun, 26 kend	100,00	100,00	100,00	100,00	
20	Terpeliharaan perlengkapan gedung kantor			1 tahun	1 tahun	1 tahun	1 tahun	100,00	100,00	100,00	100,00	
21	Terpeliharanya mebeler			1 paket, 1 tahun	1 paket, 1 tahun	1 paket, 1 tahun	1 paket, 1 tahun	100,00	100,00	100,00	100,00	
22	Terpeliharanya komputer dan perlengkapannya			36 unit	36 unit	36 unit	36 unit	100,00	100,00	100,00	100,00	
23	Terlaksananya pelatihan tupoksi			1 kgt, 50 orang	1 kgt, 50 orang	1 kgt, 50 orang	1 kgt, 50 orang	100,00	100,00	100,00	100,00	
24	Tersusunnya laporan kinerja			22 lap	22 lap	22 lap	22 lap	100,00	100,00	100,00	100,00	
25	Tersusunnya laporan keuangan semesteran			1 lap	1 lap	1 lap	1 lap	100,00	100,00	100,00	100,00	
26	Tersusunnya laporan keuangan SKPD akhir tahun			1 lap	1 lap	1 lap	1 lap	100,00	100,00	100,00	100,00	
27	Terlaksananya MONEP			5 laporan	5 laporan	5 laporan	5 laporan	100,00	100,00	100,00	100,00	
28	Tersusunnya rencana kerja dan anggaran			5 dok	5 dok	5 dok	5 dok	100,00	100,00	100,00	100,00	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
29	Tersusunnya kebijakan, norma, standar dan prosedur			1 kgt	1 kgt	1 kgt	1 kgt	100,00	100,00	100,00	100,00	
30	Terlaksananya koordinasi bidang perhubungan			1 kgt	1 kgt	1 kgt	1 kgt	100,00	100,00	100,00	100,00	
31	Terlaksananya sosialisasi kebijakan di bidang perhubungan			2 kgt	2 kgt	2 kgt	2 kgt	100,00	100,00	100,00	100,00	
32	Terlaksananya peningkatan kinerja terminal			2 kgt	2 kgt	2 kgt	2 kgt	100,00	100,00	100,00	100,00	
33	Terlaksananya pembinaan dan koordinasi perparkiran			1 kgt	1 kgt	1 kgt	1 kgt	100,00	100,00	100,00	100,00	
34	Terlaksananya inventarisasi sarana prasarana dan fasilitas LLAJ			1 kgt	1 kgt	1 kgt	1 kgt	100,00	100,00	100,00	100,00	
35	Terlaksananya pembangunan prasarana dan fasilitas perhubungan			1 kgt	1 kgt	1 kgt	1 kgt	100,00	100,00	100,00	100,00	
36	Kalibrasi dan terpeliharanya alat uji kendaraan bermotor			1 tahun, 2 kgt	1 tahun, 2 kgt	1 tahun, 2 kgt	1 tahun, 2 kgt	100,00	100,00	100,00	100,00	
37	Terpeliharanya balai pengujian kendaraan bermotor			1 gedung	1 gedung	1 gedung	1 gedung	100,00	100,00	100,00	100,00	
38	Terpeliharanya terminal			3 terminal	3 terminal	3 terminal	3 terminal	100,00	100,00	100,00	100,00	
39	Terpeliharanya rambu-rambu lalu lintas			4 jenis	4 jenis	4 jenis	4 jenis	100,00	100,00	100,00	100,00	
40	Terpeliharanya halte			1 kgt	1 kgt	1 kgt	1 kgt	100,00	100,00	100,00	100,00	
41	Terpeliharanya sarana prasarana perlintasan KA			2 jenis	2 jenis	2 jenis	2 jenis	100,00	100,00	100,00	100,00	
42	Terlaksananya kegiatan temu wicara			2 kgt	-	-	-	100,00	-	-	-	
43	Tersedianya data kinerja pengujian kendaraan bermotor			-1 kgt	1 kgt	1 kgt	1 kgt	100,00	100,00	100,00	100,00	
44	Terlaksananya operasi laik jalan dan tertib administrasi kendaraan			12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	100,00	100,00	100,00	100,00	
45	Terlaksananya pengamanan di terminal			3 kgt	3 kgt	3 kgt	3 kgt	100,00	100,00	100,00	100,00	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
46	Terlaksananya pemeliharaan kebersihan di terminal A			4 terminal, 1 tahun	4 terminal, 1 tahun	4 terminal, 1 tahun	4 terminal, 1 tahun	100,00	100,00	100,00	100,00	
47	Tersusunnya data base pelayanan angkutan			1 kgt	1 kgt	1 kgt	1 kgt	100,00	100,00	100,00	100,00	
48	Tersedianya sarana dan prasarana pelayanan angkutan umum			1 kgt	1 kgt	1 kgt	1 kgt	100,00	100,00	100,00	100,00	
49	Terlaksananya fasilitasi bidang perizinan			1 kgt	1 kgt	1 kgt	1 kgt	100,00	100,00	100,00	100,00	
50	Terlaksananya pemilihan pelajar pelopor bidang transportasi darat			1 kgt	1 kgt	1 kgt	1 kgt	100,00	100,00	100,00	100,00	
51	Terlaksananya pemilihan dan pengiriman AKUT			1 kgt	1 kgt	1 kgt	1 kgt	100,00	100,00	100,00	100,00	
52	Terlaksananya koordinasi angkutan umum			1 kgt	1 kgt	1 kgt	1 kgt	100,00	100,00	100,00	100,00	
53	Terlaksananya pemeliharaan kebersihan terminal B			4 terminal	4 terminal	4 terminal	4 terminal	100,00	100,00	100,00	100,00	
54	Tersedianya pembangunan terminal angkutan barang			1 kegiatan		-	-	100,00	-	-	-	
55	Tersedianya rambu lalu lintas			2 jenis	2 jenis	2 jenis	2 jenis	100,00	100,00	100,00	100,00	
56	Terbuatnya marka jalan			1 paket	1 paket	1 paket	1 paket	100,00	100,00	100,00	100,00	
57	Tersedianya sarana dan prasarana perlengkapan jalan			2 jenis	2 jenis	2 jenis	2 jenis	100,00	100,00	100,00	100,00	
58	Terlaksananya pengamanan lalu lintas			3 kgt	3 kgt	3 kgt	3 kgt	100,00	100,00	100,00	100,00	
59	Terlaksananya koordinasi tim lalu lintas kabupaten (traffic board)			1 kgt	1 kgt	1 kgt	1 kgt	100,00	100,00	100,00	100,00	

2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

Dinas Perhubungan Kabupaten Pemalang merupakan Perangkat Daerah penunjang Pemerintah Kabupaten Pemalang sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pemalang. Dengan demikian Dinas Perhubungan Kabupaten Pemalang merupakan "*supporting unit*" bagi organisasi perangkat daerah lainnya di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pemalang.

Sesuai dengan hal tersebut maka tugas pokok Dinas Perhubungan Kabupaten Pemalang adalah melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang perhubungan. Dalam menyelenggarakan tugas pokok tersebut diatas, Dinas Perhubungan mempunyai fungsi :

- Perumusan kebijakan teknis di bidang perhubungan.
- Pelaksanaan pelayanan penunjang penyelenggaraan pemerintahan daerah di bidang perhubungan.
- Pelaksanaan penyusunan rencana dan program, monitoring, evaluasi dan pelaporan di bidang perhubungan.
- Pelaksanaan pengelolaan sistem informasi bidang Perhubungan.
- Pelaksanaan koordinasi dan fasilitasi di bidang perhubungan.
- Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai tugas pokok dan fungsinya.

1. Isu dan Masalah Mendesak

Isu dan permasalahan yang mendesak saat ini berkenaan dengan bidang perhubungan di wilayah Kabupaten Pemalang adalah sebagai berikut :

- a. Letak Kabupaten Pemalang yang dilalui oleh jalan nasional (Jalur Pantura) dan jalan provinsi dengan volume lalu lintas yang padat memerlukan penanganan serius demi keselamatan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas di jalan. Untuk itu, diperlukan adanya peningkatan jumlah dan kualitas perlengkapan jalan yang ada seperti : APILL (*traffic light*), Rambu Lalu Lintas, Marka Jalan, Pagar Pengaman Jalan (*Guardrail*), Patok Pengaman Jalan (*Delineator*), Cermin Tikungan, Warning Lamp. Namun demikian, adanya penanganan yang berjenjang berdasarkan kewenangan yang ada pada jalan nasional maupun jalan provinsi menyulitkan Pemerintah Kabupaten Pemalang dalam usaha memenuhi perlengkapan

jalan yang ada pada jalan nasional dan jalan provinsi, baik yang terletak pada ibukota kabupaten maupun yang berada di luar ibukota.

- b. Peningkatan keselamatan lalu lintas pada perlintasan sebidang menjadi isu strategis saat ini, karena pembangunan, peningkatan, maupun penutupan jalan perlintasan sebidang pada jalan kabupaten menjadi tanggung jawab pemerintah kabupaten. Akan tetapi koordinasi yang panjang menyulitkan pemerintah kabupaten dalam usaha mewujudkan peningkatan keselamatan pada perlintasan sebidang.
- c. Dengan adanya amanat untuk mendukung program Pengarusutamaan Hak Anak, maka Dinas Perhubungan perlu mewujudkan program tersebut dalam usaha peningkatan keselamatan di sekolah-sekolah dalam bentuk pembuatan *zebra cross* atau zona selamat sekolah dan pemasangan rambu-rambu di sekitar sekolah.
- d. Diperlukannya suatu dukungan data dalam pembangunan. Dengan tersedianya data, dapat diketahui perkembangan pelaksanaan tugas suatu organisasi. Dinas Perhubungan memerlukan adanya data-data pembangunan di bidang perhubungan. Dalam bidang perhubungan, data yang diperlukan ada diantaranya :
 - Data sarana, prasarana dan fasilitas perhubungan, berupa data angkutan umum, data prasarana perhubungan, data perlengkapan jalan, data kinerja jalan;
 - Data bus dan penumpang yang ada di terminal;
 - Data kendaraan bermotor wajib uji dan data pengujian kendaraan bermotor.

Memperhatikan kondisi ideal dan isu yang berkembang, maka masalah mendesak yang dihadapi antara lain :

a. Bidang Perhubungan

Permasalahan yang muncul pada bidang perhubungan adalah:

1) Bidang Lalu Lintas Jalan

- a) Masih diperlukannya pemenuhan fasilitas perlengkapan jalan terpasang di Ruas Jalan Kabupaten;
- b) Masih diperlukannya pemenuhan data fasilitas perlengkapan jalan terpasang di ruas jalan kabupaten, Provinsi dan Nasional di Kabupaten Pematang ;

- c) Masih rendahnya pemahaman keselamatan utamanya para pengemudi angkutan umum
- 2) Bidang Angkutan jalan
 - a) Rendahnya jumlah angkutan umum kewenangan Pemerintah Kabupaten yang sesuai dengan SPM;
 - b) Masih diperlukannya fasilitasi penambahan rute/trayek angkutan aglomerasi perkotaan dan angkutan perintis;
 - c) Masih rendahnya pengguna angkutan umum pada angkutan perdesaan dan angkutan perkotaan di Kabupaten Pemalang
 - d) Masih beroperasinya angkutan bak terbuka untuk mengangkut penumpang, yang tidak sesuai standar
- 3) Bidang Jaringan Transportasi dan Perkeretaapian
 - a) Masih rendahnya nilai IKLI pada Terminal Penumpang Tipe C di Kabupaten Pemalang;
 - b) Masih diperlukannya pemenuhan fasilitas keselamatan di Perlintasan Kereta Api;

2.4. Review Terhadap Rancangan Awal RKPD

Proses Rancangan Renja Dinas Perhubungan Tahun 2019 berdasarkan Rancangan Awal RKPD Kabupaten Pemalang Tahun 2018 yang telah disusun berdasarkan dokumen perencanaan jangka menengah Kabupaten Pemalang (RPJMD 2016 – 2021) yang telah ditetapkan. Selain itu, dalam menyusun Rancangan Renja Perangkat Daerah juga mendasari pada Rancangan Renstra Perangkat Daerah 2016 – 2021 yang telah disahkan pula. Hal tersebut sebagai dasar dalam penyusunan program dan kegiatan pada Rancangan Awal RKPD 2018 dimana besarnya anggaran yang direncanakan oleh Dinas Perhubungan disesuaikan dengan kebutuhan dari kinerja Dinas Perhubungan selaku lembaga yang melayani perhubungan di seluruh wilayah Kabupaten Pemalang dalam upaya mewujudkan visi dan misi yang telah ditetapkan oleh Bupati dan Wakil Bupati terpilih sebagaimana tertuang dalam RPJMD dan Renstra Perangkat Daerah.

Review yang dilakukan yaitu dengan membandingkan antara Rancangan Awal RKPD dengan hasil analisis kebutuhan.

Berikut adalah tabel review terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2019 dengan hasil analisis kebutuhan :

Tabel 2.6
Review Terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2020
Kabupaten Pemalang

No	RANCANGAN AWAL RKPD TAHUN 2020					HASIL ANALISA KEBUTUHAN					Catatan Penting
	PROGRAM / KEGIATAN	LOKASI	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp ribuan)	PROGRAM / KEGIATAN	LOKASI	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp ribuan)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
A	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran		<i>tersedianya pelayanan administrasi perkantoran untuk meningkatkan kinerja terhadap kebutuhan</i>	100%		Program Pelayanan Administrasi Perkantoran		<i>tersedianya pelayanan administrasi perkantoran untuk meningkatkan kinerja terhadap kebutuhan</i>	100%		
1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Dishub	surat yang terkirim	3.500 surat	21,405	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Dishub	surat yang terkirim	3.500 surat	18,865	
2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air, dan Listrik	Dishub	sumber daya yang tercukupi	3 jenis, 12 bulan	157,200	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air, dan Listrik	Dishub	sumber daya yang tercukupi	3 jenis, 12 bulan	181,200	
3	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Dishub	kebutuhan peralatan dan perlengkapan	1 unit, 12 bulan	6,400	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Dishub	kebutuhan peralatan dan perlengkapan	1 unit, 12 bulan	6,400	
4	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	Dishub	jumlah perizinan kendaraan dinas	38 kendaraan	39,800	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	Dishub	jumlah perizinan kendaraan dinas	38 kendaraan	36,900	
5	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Dishub	jumlah petugas	26 orang, 12 bulan	240,800	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Dishub	jumlah petugas	26 orang, 12 bulan	237,000	
6	Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja	Dishub	perbaikan peralatan	1 jenis	6,000	Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja	Dishub	perbaikan peralatan	1 jenis	6,000	
7	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Dishub	kebutuhan atk	1 paket	15,500	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Dishub	kebutuhan atk	1 paket	15,514	
8	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Dishub	kebutuhan Barang cetakan	3 paket	298,903	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Dishub	kebutuhan Barang cetakan	3 paket	298,903	

9	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor	Dishub	keb. Komp. Listrik	2 jenis, 1 tahun (perawatan instalasi listrik dan pemasangan LPJU di terminal)	14,500	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor	Dishub	keb. Komp. Listrik	2 jenis, 1 tahun (perawatan instalasi listrik dan pemasangan LPJU di terminal)	24,500
10	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Dishub	jenis bahan bacaan	3 jenis, 12 bulan	5,340	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Dishub	jenis bahan bacaan	3 jenis, 12 bulan	5,340
11	Penyediaan Makanan dan Minuman	Dishub	jenis makanan	10 jenis, 12 bulan	69,110	Penyediaan Makanan dan Minuman	Dishub	jenis makanan	10 jenis, 12 bulan	69,110
12	Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi di Dalam dan ke Luar Daerah	Dishub	pelaksanaan rapat	1 tahun	250,000	Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi di Dalam dan ke Luar Daerah	Dishub	pelaksanaan rapat	1 tahun	250,000
13	Penyediaan Jasa Keamanan	Dishub	tenaga keamanan	31 orang, 12 bulan	380,800	Penyediaan Jasa Keamanan	Dishub	tenaga keamanan	31 orang, 12 bulan	385,400
B	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Dishub	<i>meningkatnya sarana prasarana aparatur untuk menunjang peningkatan kinerja terhadap kebutuhan</i>	100%		Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Dishub	<i>meningkatnya sarana prasarana aparatur untuk menunjang peningkatan kinerja terhadap kebutuhan</i>	100%	
14	Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional	Dishub	Pengadaan Kendaraan dinas	-	-	Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	Dishub	Pengadaan kendaraan dinas	5 kendaraan	70,000
15	Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	Dishub	Perlengkapan gedung kantor	2 jenis	22,500	Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	Dishub	Perlengkapan gedung kantor	2 jenis	16,000
16	Pengadaan Mebeleur	Dishub	Kebutuhan mebeleur	3 jenis	48,813	Pengadaan Mebeleur	Dishub	keb. mebeleur	3 jenis	-
17	Pengadaan komputer dan perlengkapannya	Dishub	Pengadaan computer	-	-	Pengadaan komputer dan perlengkapannya	Dishub	Pengadaan komputer	2 unit	11,135
18	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Dishub	pemeliharaan gedung kantor	1 unit	150,850	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Dishub	pemeliharaan gedung kantor	1 unit	230,950

19	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/ Operasional	Dishub	kend. Dinas yang terpelihara	38 kend	123,920	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/ Operasional	Dishub	kend. Dinas yang terpelihara	55 kend	93,920	
20	Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor	Dishub	pemeliharaan perlengkapan Gedung	3 jenis, 1 tahun	15,790	Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor	Dishub	pemeliharaan perlengkapan gedung	3 jenis, 1 tahun	15,790	
21	Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur	Dishub	Pemeliharaan mebeleur	1 tahun	12,000	Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur	Dishub	Pemeliharaan mebeleur	1 tahun	15,000	
22	Pemeliharaan Rutin/Berkala Komputer dan Perlengkapannya	Dishub	komputer yang terpelihara	47 unit	35,000	Pemeliharaan Rutin/Berkala Komputer dan Perlengkapannya	Dishub	komputer yang terpelihara	47 unit	35,000	
C	Program Peningkatan Disiplin Aparatur		<i>terwujudnya peningkatan disiplin aparatur</i>	100%		Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur		<i>terwujudnya peningkatan disiplin aparatur</i>	100%		
23	Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya	Dishub	Tersedianya pakaian dinas untuk pegawai dishub	10 paket	0	Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya	Dishub	Tersedianya pakaian dinas untuk pegawai dishub	Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya	-	
D	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur		<i>terwujudnya peningkatan kapasitas sumber daya aparatur</i>	100%		Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur		<i>terwujudnya peningkatan kapasitas sumber daya aparatur</i>	100%		
24	Pelatihan Teknis Pelaksanaan Tupoksi SKPD	Dishub	Pegawai yang ikut pelatihan	91 orang	219,065	Pelatihan Teknis Pelaksanaan Tupoksi SKPD	Dishub	Pegawai yang ikut bintek	91 orang	230,485	
E	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan		<i>tersusunnya laporan capaian kinerja dan keuangan lima tahunan</i>	100%		Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan		<i>tersusunnya laporan capaian kinerja dan keuangan lima tahunan</i>	100%		
25	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Dishub	tersusunnya laporan capaian kinerja	31 laporan	65,328	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Dishub	tersusunnya laporan capaian kinerja	31 laporan	31,988	

26	Penyusunan Pelaporan Keuangan Semesteran	Dishub	tersusunnya laporan keuangan semesteran	1 laporan	8,600	Penyusunan Pelaporan Keuangan Semesteran	Dishub	tersusunnya laporan keuangan semesteran	1 laporan	3,930
27	Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun	Dishub	tersusunnya laporan keuangan akhir tahun	1 laporan	13,800	Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun	Dishub	tersusunnya laporan keuangan akhir tahun	1 laporan	4,860
28	Monitoring, Evaluasi, dan Pelaporan	Dishub	pelaksanaan monev	7 laporan	43,170	Monitoring, Evaluasi, dan Pelaporan	Dishub	pelaksanaan monev	7 laporan	24,870
F	Program Peningkatan Perencanaan dan Penganggaran SKPD		<i>terwujudnya peningkatan perencanaan dan penganggaran SKPD</i>	100%		Program Peningkatan Perencanaan dan Penganggaran SKPD		<i>terwujudnya peningkatan perencanaan dan penganggaran SKPD</i>	100%	
29	Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Penganggaran SKPD	Dishub	jenis dokumen	6 dokumen	62.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Penganggaran SKPD	Dishub	jenis dokumen	6 dokumen	52,950
G	Program Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan		<i>terwujudnya pembangunan prasarana dan fasilitas perhubungan</i>	100%		Program Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan		<i>terwujudnya pembangunan prasarana dan fasilitas perhubungan</i>	100%	
30	Penyusunan kebijakan, norma, standar dan prosedur bidang perhubungan	Dishub	Penyusunan kebijakan bidang perhubungan	2 perbub	-	Penyusunan kebijakan, norma, standar dan prosedur bidang perhubungan	Dishub	Penyusunan kebijakan bidang perhubungan	2 perbub	39,735
31	Koordinasi dalam Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan	Dishub	kegiatan koordinasi bid perhubungan	1 kegiatan	77,500	Koordinasi dalam Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan	Dishub	kegiatan koordinasi bid perhubungan	1 kegiatan	77,500
32	Sosialisasi Kebijakan di bidang Perhubungan	Dishub	Sosialisasi kebijakan	2 kegiatan	37,476	Sosialisasi Kebijakan di bidang Perhubungan	Dishub	Sosialisasi kebijakan	2 kegiatan	182,710
33	Peningkatan Pengelolaan Terminal Angkutan Darat	Dishub	kegiatan pembinaan petugas terminal	1 kegiatan	15,230	Peningkatan Pengelolaan Terminal Angkutan Darat	Dishub	kegiatan pembinaan petugas terminal	1 kegiatan	11,890

34	Peningkatan Pengelolaan Parkir di Tepi Jalan Umum	Dishub	Pembinaan dan koordinasi perparkiran	2 kegiatan	47,665	Peningkatan Pengelolaan Parkir di Tepi Jalan Umum	Dishub	Pembinaan dan koordinasi perparkiran	2 kegiatan	211,124	
35	Inventarisasi Data Sarana, Prasarana, dan Fasilitas Perhubungan	Dishub	Tersedianya data kinerja perhubungan	1 kegiatan	234,375	Inventarisasi Data Sarana, Prasarana, dan Fasilitas Perhubungan	Dishub	Tersedianya data kinerja perhubungan	1 kegiatan	182,075	
36	Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan	Dishub	Tersedianya prasarana dan fasilitas perhubungan	1 kegiatan (sertifikasi tanah pelabuhan)	510,000	Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan	Dishub	Tersedianya prasarana dan fasilitas perhubungan	1 kegiatan (sertifikasi tanah pelabuhan)	145,987	
H	Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan		<i>terlaksananya rehabilitasi dan pemeliharaan prasarana dan fasilitas LLAJ</i>	100%		Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan		<i>terlaksananya rehabilitasi dan pemeliharaan prasarana dan fasilitas LLAJ</i>	100%		
37	Rehabilitasi/Pemeliharaan Sarana Alat Pengujian Kendaraan Bermotor	Dishub	kegiatan pemeliharaan alat uji	1 kegiatan	92,000	Rehabilitasi/Pemeliharaan Sarana Alat Pengujian Kendaraan Bermotor	Dishub	kegiatan pemel dan peningk alat uji	1 kegiatan	92,000	
38	Rehabilitasi/Pemeliharaan Balai Pengujian Kendaraan Bermotor	Dishub	kegiatan pemeliharaan balai uji	1 gedung	45,000	Rehabilitasi/Pemeliharaan Balai Pengujian Kendaraan Bermotor	Dishub	kegiatan pemeliharaan balai uji	1 gedung	45,000	
39	Rehabilitasi/Pemeliharaan Terminal/Pelabuhan	Dishub	terminal yang terpelihara	3 terminal	-	Rehabilitasi/Pemeliharaan Terminal/Pelabuhan	Dishub	terminal yang terpelihara	3 terminal	-	
40	Rehabilitasi/Pemeliharaan Rambu Lalu Lintas	Dishub	pemeliharaan rambu lalu lintas	4 jenis	288,281	Rehabilitasi/Pemeliharaan Rambu Lalu Lintas	Dishub	pemeliharaan rambu lalu lintas	4 jenis	187,381	
41	Rehabilitasi/pemeliharaan Halte	Dishub	pemeliharaan Halte	1 paket	136,560	Rehabilitasi/pemeliharaan Halte	Dishub	pemeliharaan Halte	1 paket	54,641	
42	Rehabilitasi/Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Perlintasan KA	Dishub	Pemeliharaan perlintasan KA	2 jenis (pemeliharaan pos perlintasan KA dan pemeliharaan perlintasan KA)	54,600	Rehabilitasi/Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Perlintasan KA	Dishub	Pemeliharaan perlintasan KA	2 jenis (pemeliharaan pos perlintasan KA dan pemeliharaan perlintasan KA)	54,600	

			<i>meningkatnya pelayanan angkutan</i>	100%		Program Peningkatan Pelayanan Angkutan		<i>meningkatnya pelayanan angkutan</i>	100%		
43	Kegiatan Uji Kelayakan Sarana Transportasi guna Keselamatan penumpang	Dishub	terlaksananya pengujian kendaraan (update data KBWU)	550 orang	409,640	Kegiatan Uji Kelayakan Sarana Transportasi guna Keselamatan	Dishub	terlaksananya pengujian kendaraan (update data KBWU)	550 orang	377,540	
44	Kegiatan Pengendalian Disiplin Pengoperasian Angkutan Umum	Dishub	terlaksananya operasi laik jalan dan tertib administrasi	20 kali	64,780	Kegiatan Pengendalian Disiplin Angkutan Umum	Dishub	terlaksananya operasi laik jalan dan tertib administrasi	20 kali	62,480	
45	Kegiatan Penciptaan Keamanan dan Kenyamanan Penumpang di Lingkungan Terminal	Pemalang, Comal, Moga, Randudongkal	terlaksananya pam di terminal	408 orang	137,210	Kegiatan Penciptaan Keamanan dan Kenyamanan Penumpang di Lingkungan Terminal	Pemalang, Comal, Moga, Randudongkal	terlaksananya pam di terminal	408 orang	138,910	
46	Kegiatan Penciptaan Disiplin dan Pemeliharaan Kebersihan di Lingkungan Terminal A	Pemalang, Petarukan, Angkot Pemalang, Comal	pemeliharaan kebersihan terminal	4 terminal (pemeliharaan drainase terminal angkutan kota)	323,030	Kegiatan Penciptaan Disiplin dan Pemeliharaan Kebersihan di Lingkungan Terminal A	Pemalang, Petarukan, Angkot Pemalang, Comal	pemeliharaan kebersihan terminal	4 terminal (pemeliharaan drainase terminal angkutan kota)	232,430	
47	Pengumpulan dan analisis data base pelayanan angkutan	Dishub	Terlaksananaya pengumpulan data	1 dokumen	109,610	Pengumpulan dan analisis data base pelayanan angkutan	Dishub	Terlaksananaya pengumpulan data	1 dokumen`	122,160	
48	Pengembangan sarana dan prasarana pelayanan jasa angkutan	Dishub	Terlaksananaya saran pelayanan angkutan	1 kegiatan, 12 bulan	126,734	Penegembangan sarana dan prasarana pelayanan jasa angkutan	Dishub	Terlaksananaya saran pelayanan angkutan	1 kegiatan, 12 bulan	73,482	
49	Fasilitasi Perizinan di bidang Perhubungan	Dishub	Terlaksananya pelayanan perizinan angkutan umum	1 kegiatan, 12 bulan	63,150	Fasilitasi Perizinan di bidang Perhubungan	Dishub	Terlaksananya pelayanan perizinan angkutan umum	1 kegiatan, 12 bulan	61,050	

50	Kegiatan Pemilihan dan Pemberian Penghargaan kepada para Sopir/Juru Mudi/Awak Kendaraan Angkutan Umum Teladan	Dishub	terselenggaranya pemilihan dan pengiriman AKUT	40 orang	21,110	Kegiatan Pemilihan dan Pemberian Penghargaan kepada para Sopir/Juru Mudi/Awak Kendaraan Angkutan Umum Teladan	Dishub	terselenggaranya pemilihan dan pengiriman AKUT	40 orang	23,537
51	Koordinasi dalam Peningkatan Pelayanan Angkutan	Dishub	Koordinasi	12 laporan	58,620	Koordinasi dalam Peningkatan Pelayanan Angkutan	Dishub	koordinasi	12 laporan	58,620
52	Kegiatan Penciptaan Disiplin dan Pemeliharaan Kebersihan di Lingkungan Terminal B	Randudongkal, Moga, Belik, Warungpring	pemeliharaan kebersihan terminal	4 terminal	307,865	Kegiatan Penciptaan Disiplin dan Pemeliharaan Kebersihan di Lingkungan Terminal B	Randudongkal, Moga, Belik, Warungpring	pemeliharaan kebersihan terminal	4 terminal	290,695
J	Program Pembangunan Sarana dan Prasarana Perhubungan		<i>terwujudnya pembangunan sarana dan prasarana perhubungan</i>	100%		Program Pengendalian dan Pengamanan Lalu Lintas		<i>terwujudnya pengendalian dan pengamanan lalu lintas</i>	100%	
53	Pembangunan gedung terminal	Kabupaten Pemalang	<i>Terpenuhinya pembangunan terminal</i>	-	2,884,850	Pembangunan gedung terminal	Kabupaten Pemalang	<i>Terpenuhinya pembangunan terminal</i>	-	-
K	Program Pengendalian dan Pengamanan Lalu Lintas		<i>terwujudnya pengendalian dan pengamanan lalu lintas</i>	100%		Program Pengendalian dan Pengamanan Lalu Lintas		<i>terwujudnya pengendalian dan pengamanan lalu lintas</i>	100%	
54	Pengadaan Rambu-rambu Lalu Lintas	Dishub	tersedianya rambu lalu lintas	1 paket	303,924	Pengadaan Rambu-rambu Lalu Lintas	Dishub	tersedianya rambu lalu lintas	1 paket	365,540
55	Pengadaan marka jalan	Dishub	Tersedianya marka jalan	1 paket	563,200	Pengadaan marka jalan	Dishub	Tersedianya marka jalan	1 paket	474,100
56	Pengadaan Sarana dan Prasarana Perlengkapan Jalan	Dishub	tersedianya perlengkapan jalan	2 unit	917,010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Perlengkapan Jalan	Dishub	tersedianya perlengkapan jalan	2 unit	1,238,820
57	Pengendalian dan Pengamanan Lalu Lintas di Jalan	Dishub	terlaksananya pam jalan, pengadaan HT	3 kegiatan	1,062,800	Pengendalian dan Pengamanan Lalu Lintas di Jalan	Dishub	terlaksananya pam jalan , pengadaan HT	3 kegiatan	989,950

58	Koordinasi dalam Peningkatan Pengendalian dan Pengamanan Lalu Lintas di Jalan	Dishub	terlaksananya koord trafficboard	1 kegiatan	70,240	Koordinasi dalam Peningkatan Pengendalian dan Pengamanan Lalu Lintas di Jalan	Dishub	terlaksananya koord trafficboard	1 kegiatan	49,990
----	-------------------------------------------------------------------------------	--------	----------------------------------	------------	--------	-------------------------------------------------------------------------------	--------	----------------------------------	------------	--------

Berdasarkan hasil review pada tabel 3 tersebut diatas dapat dijelaskan sebagai berikut :

1. Jumlah kegiatan yang telah tercantum pada Simcan adalah sebanyak 53 kegiatan.
2. Dalam hal perencanaan anggaran, ada beberapa kegiatan yang harus di masukkan ke dalam perencanaan anggaran, hal tersebut lebih disebabkan karena adanya progres pekerjaan yang harus diselesaikan.
3. Prioritas pendanaan lebih diberikan pada kegiatan-kegiatan rutin yang memang harus terpenuhi untuk berlangsungnya suatu organisasi, dan kegiatan-kegiatan yang dapat mendukung tercapainya target IKK dan SPM.

2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Sesuai dengan program/kegiatan di Dinas Perhubungan Kabupaten Pematang, bahwa Dinas Perhubungan Kabupaten Pematang tidak melaksanakan program/kegiatan hasil Musrenbang yang telah diusulkan dari masyarakat.

BAB III

TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional

1. Telaahan Renstra Kementerian Perhubungan

a. Visi dan Misi Kementerian Perhubungan

Visi Kementerian Perhubungan adalah **“Terwujudnya Pelayanan Transportasi yang Handal, Berdaya Saing dan Memberikan Nilai Tambah”**, dengan misi :

- 1) Peningkatan pelayanan jasa transportasi untuk mewujudkan konektivitas nasional;
- 2) Peningkatan Penyelenggaraan Penelitian, Pengembangan dan Penerapan IPTEK dalam rangka pengembangan teknologi transportasi yang ramah lingkungan;
- 3) Peningkatan profesionalisme sumber daya manusia dan restrukturisasi/reformasi kelembagaan dan regulasi.

Adapun tujuannya adalah mewujudkan penyelenggaraan transportasi yang efektif dan efisien yang didukung SDM transportasi yang berkompeten guna mendukung perwujudan Indonesia yang lebih sejahtera, sejalan dengan perwujudan Indonesia yang aman dan damai serta adil dan demokratis. Penyelenggaraan kegiatan transportasi yang efektif berkaitan dengan ketersediaan aksesibilitas, optimalisasi kapasitas, maksimalisasi kualitas serta keterjangkauan dalam pelayanan, sedangkan penyelenggaraan transportasi yang efisien berkaitan dengan kemampuan pengembangan dan penerapan teknologi transportasi serta peningkatan kualitas SDM transportasi yang berdampak kepada maksimalisasi daya guna dan minimasi biaya yang menjadi beban masyarakat, dengan strategi pembangunan transportasi nasional Tahun 2015-2019 adalah:

- 1) Perencanaan Terpadu antara Pemerintah Pusat dengan Pemda
- 2) Pelibatan Pemda/BUMN/ Swasta

- 3) Kompetensi & Profesionalisme SDM
- 4) Mengutamakan aspek keselamatan keamanan, kehandalan
- 5) Pembangunan transportasi dengan skema multi year
- 6) Mengutamakan aspek kelestarian lingkungan

Beberapa hal yang dapat ditarik kesimpulan dari hasil telaah Renstra Kementerian Perhubungan 2015-2019 yang berkaitan dengan kepentingan Kabupaten Pematang Jaya adalah:

- 1) Peningkatan pelayanan jasa transportasi untuk mewujudkan konektivitas nasional; hal ini selaras dengan rencana pembangunan terminal angkutan barang, rencana pembangunan pelabuhan dan bandara perintis
- 2) Peningkatan Penyelenggaraan Penelitian, Pengembangan dan Penerapan IPTEK dalam rangka pengembangan teknologi transportasi yang ramah lingkungan; misi ke dua kementerian perhubungan ini sejalan dengan rencana pembuatan Kawasan Tertib Lalu lintas.

Adapun permasalahan pelayanan PD berdasarkan sasaran K/L beserta faktor penghambat atau pendorong dari pelayanan sebagai berikut :

No	Sasaran Jangka Menengah Renstra K/L	Permasalahan Pelayanan PD	Sebagai Faktor	
			Penghambat	Pendorong
1.	Meningkatnya keselamatan, keamanan dan pelayanan sarana dan prasarana transportasi sesuai Standar Pelayanan	Belum tercapainya target Nasional Standar Pelayanan Minimal (SPM)	Anggaran untuk pembangunan fasilitas LLAJ yang terbatas	Adanya dana DAK keselamatan transportasi darat

Minimal (SPM)

	Jumlah kecelakaan lalu-lintas yang meningkat	Angka pertumbuhan kendaraan bermotor yang tinggi	Koordinasi antar stake holder transportasi dalam forum LLAJ
2.	Meningkatnya aksesibilitas masyarakat terhadap pelayanan sarana dan prasarana transportasi guna mendorong pengembangan konektivitas antar wilayah	Kerusakan jalan, disebagian wilayah akibat kelebihan muatan oleh kendaraan barang	Keterbatasan sarana dan prasarana dengan Dishub Prov. Jawa Tengah

b. Kebijakan Nasional antara lain :

a. Membangun Konektivitas Nasional adalah :

1. Melanjutkan peningkatan keselamatan, keamanan dan keandalan sarana/prasarana transportasi
2. Melanjutkan peningkatan kompetensi dan profesionalisme SDM transportasi
3. Melanjutkan pengembangan teknologi transportasi yang ramah lingkungan
4. Melanjutkan penguatan konektivitas nasional yang bersinergi dengan konektivitas ASEAN

- b. Membangun Industri Jasa Transportasi Nasional adalah:
 - 1. Mendorong peran Pemerintah Provinsi, Kabupaten/Kota, BUMN dan swasta dalam penyediaan infrastruktur sektor transportasi
 - 2. Meningkatkan kepastian hukum
 - 3. Melanjutkan reformasi regulasi/deregulasi.

- c. Kebijakan pembangunan transportasi darat adalah:
 - 1) Meningkatkan kondisi pelayanan prasarana jalan melalui penanganan muatan lebih secara komprehensif, dan melibatkan berbagai instansi terkait;
 - 2) Meningkatkan keselamatan lalu lintas jalan secara komprehensif dan terpadu dari berbagai aspek (pencegahan, pembinaan dan penegakan hukum, penanganan dampak kecelakaan dan daerah rawan kecelakaan, sistem informasi kecelakaan lalu lintas dan kelaikan sarana, serta ijin pengemudi di jalan);
 - 3) Meningkatkan kelancaran pelayanan angkutan jalan secara terpadu: (a) penataan sistem jaringan dan terminal; (b) manajemen lalu lintas; (c) pemasangan fasilitas dan rambu jalan; (d) penegakan hukum dan disiplin di jalan; (e) mendorong efisiensi transportasi barang dan penumpang di jalan melalui deregulasi pungutan dan retribusi di jalan, penataan jaringan dan ijin trayek; (f) kerjasama antar lembaga pemerintah (pusat dan daerah);
 - 4) Meningkatkan aksesibilitas pelayanan kepada masyarakat diantaranya melalui penyediaan pelayanan angkutan perintis pada daerah terpencil;
 - 5) Meningkatkan kinerja peraturan dan kelembagaan melalui: (a) Penataan sistem transportasi jalan sejalan dengan system transportasi nasional dan wilayah (lokal); diantaranya melalui penyusunan RUJTJ (Rancangan Umum Jaringan Transportasi Jalan) meliputi penataan simpul, ruang kegiatan, ruang lalu lintas serta penataan pola distribusi nasional sesuai dengan rencana kelas

- jalan; (b) Menyukseskan peraturan pelaksanaan dari Undang-Undang No.22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan; (c) Peningkatan pembinaan teknis transportasi di daerah, sejalan dengan desentralisasi dan otonomi daerah, dibuat sistem standar pelayanan minimal dan standar teknis di bidang LLAJ serta skema untuk peningkatan pelaksanaan pengendalian dan pengawasan LLAJ di daerah; (d) Meningkatkan peran serta, investasi swasta dan masyarakat dalam penyelenggaraan transportasi jalan dengan menciptakan iklim kompetisi yang sehat dan transparan dalam penyelenggaraan transportasi, serta pembinaan terhadap operator dan pengusaha di bidang LLAJ;
- 6) Meningkatkan profesionalisme SDM (petugas, disiplin operator dan pengguna di jalan), meningkatkan kemampuan manajemen dan rekayasa lalu lintas, serta pembinaan teknis tentang pelayanan operasional transportasi;
 - 7) Mendukung pengembangan transportasi yang berkelanjutan, terutama penggunaan transportasi umum massal di perkotaan yang padat dan yang terjangkau dan efisien, berbasis masyarakat dan terpadu dengan pengembangan wilayahnya.

2. Pemerintah Kabupaten Pematang

a. Visi

Pembangunan adalah suatu proses perubahan struktural untuk mewujudkan kondisi ideal yang diharapkan melalui pencapaian sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan dan dilaksanakan secara sistematis dan berkelanjutan melalui tahapan yang direncanakan dengan mendasarkan pada kondisi yang ada. Untuk mewujudkan kondisi ideal tersebut telah ditetapkan visi Kabupaten Pematang, yaitu “**Terwujudnya Pematang Hebat yang Berdaulat, Berjatidiri, Mandiri dan Sejahtera.**”

Penjelasan Visi:

Dalam visi tersebut di atas terdapat lima gagasan pokok yang menjiwai seluruh gerak dan proses pemerintahan dan pembangunan Kabupaten Pemalang, yaitu :

- a. **Pemalang Hebat**, Terwujudnya Pemalang Hebat merupakan suatu kondisi dimana harapan, keinginan, cita-cita yang diharapkan menjadi ada. Pemalang Hebat merupakan *ultimate goal* yang dicita-citakan dan yang dibangun dari kondisi Pemalang yang berdaulat, berjatidiri, mandiri dan sejahtera. **Pemalang Hebat** juga menjadi *tagline* pembangunan daerah dalam memacu semangat, percepatan dan sinergitas para *stakeholders* terkait dalam mengupayakan perwujudan pembangunan Pemalang.
- b. **Berdaulat** diartikan sebagai kemampuan pemerintah dan masyarakat Pemalang yang mampu membangun, mengatur dan mengurus kepentingan daerah/ rumah tangganya sendiri menurut prakarsa dan partisipasi masyarakat dalam pembangunan daerah berdasarkan azas musyawarah mufakat dan gotongroyong, dengan tetap memperhatikan sinergitas pembangunan dan tata kelola pemerintahan yang baik serta penegakan supremasi hukum.
- c. **Berjatidiri** diartikan sebagai pembangunan Pemalang yang memiliki keunggulan yang berbasis *local wisdom/local value* dengan menumbuhkan kembali seni dan kebudayaan asli daerah sebagai landasan pembentukan jatidiri dan kepribadian masyarakat yang agamis, toleran, harmonis dan saling menghormati.
- d. **Mandiri** diartikan sebagai pembangunan Pemalang yang mengandalkan dan mengoptimalkan seluruh sumberdaya yang dimiliki, meningkatkan sarana prasarana infrastruktur dasar serta memperkuat sentra-sentra produksi berbasis kewilayahan, pengembangan ekonomi kerakyatan dan kedaulatan pangan berbasis sumber daya lokal.
- e. **Sejahtera** diartikan sebagai kondisi masyarakat Pemalang yang berkualitas, peningkatan pendidikan dan derajat kesehatan

masyarakat yang didukung daya saing masyarakat dan keberdayaan perempuan dan perlindungan anak.

b. Misi

Pencapaian visi "Terwujudnya Pemalang Hebat yang Berdaulat, Berjati diri, Mandiri dan Sejahtera" ditempuh melalui 7 (tujuh) misi adalah :

1. Menjunjung tinggi kedaulatan rakyat melalui permusyawaratan perwakilan dari semua tingkatan dengan mengedepankan prinsip pembangunan partisipatif dan gotong royong
2. Mewujudkan kesempatan dan kualitas pendidikan dan kesehatan yang merata dan berkeadilan
3. Meneguhkan ekonomi kerakyatan berbasis pertanian, kelautan, perdagangan serta usaha kecil dan menengah (UKM) serta upaya penanggulangan kemiskinan
4. Mewujudkan sarana dan prasarana dasar yang merata untuk memperkuat sentra-sentra produksi berbasis kewilayahan sesuai dengan karakteristik dan potensi daerah
5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, demokratis, terpercaya, dan reformasi sistem yang bebas korupsi, bermartabat serta memberikan kemudahan investasi dalam upaya meningkatkan daya saing daerah
6. Menumbuhkan kembali Budaya Asli Daerah Kabupaten Pemalang sebagai landasan pembentukan jati diri Pemalang untuk memperkokoh kepribadian bangsa
7. Memberikan rasa aman kepada masyarakat dan memperkokoh kebhinekaan dengan mengembangkan norma kehidupan beragama yang toleran, harmonis dan saling menghormati dengan didasarkan pada prinsip Ketuhanan Yang Maha Esa.

Dinas Perhubungan mendukung pencapaian misi yang ke 4 (Empat) yaitu “ *Meningkatkan sarana prasarana dasar serta memperkuat sentra-sentra produksi berbasis kewilayahan sesuai dengan karakteristik dan potensi wilayah* “ sangat terkait dengan fungsi Dinas Perhubungan yaitu Meningkatkan kemudahan akses transportasi masyarakat Dengan Meningkatkannya ketersediaan sarana transportasi umum bagi masyarakat, maka program pembangunan yang mendukung misi keempat ini adalah:

1. Program Pembangunan Prasarana Dan Fasilitas Perhubungan, meliputi kegiatan :
 - a. Perencanaan pembangunan prasarana dan fasilitas perhubungan;
 - b. Penyusunan kebijakan, norma, standar dan prosedur bidang perhubungan;
 - c. Koordinasi dalam pembangunan prasarana dan fasilitas perhubungan;
 - d. Sosialisasi kebijakan di bidang perhubungan;
 - e. Peningkatan pengelolaan terminal angkutan darat;
 - f. Peningkatan pengelolaan parkir di tepi jalan;
 - g. Inventarisasi data sarana, prasarana dan fasilitas perhubungan;
 - h. Pembangunan prasarana dan fasilitas perhubungan.
2. Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas LLAJ, meliputi kegiatan :
 - a. Rehabilitasi/pemeliharaan sarana alat pengujian kendaraan bermotor;
 - b. Rehabilitasi/pemeliharaan prasarana balai pengujian kendaraan bermotor;
 - c. Rehabilitasi/pemeliharaan rambu-rambu lalu lintas;
 - d. Rehabilitasi/pemeliharaan halte;
 - e. Rehabilitasi/pemeliharaan sarana dan prasarana perlintasan KA;
3. Program Peningkatan Pelayanan Angkutan, meliputi kegiatan :
 - a. Kegiatan penyuluhan bagi para sopir/juru mudi untuk peningkatan keselamatan penumpang;

- b. Kegiatan peningkatan disiplin masyarakat menggunakan angkutan;
 - c. Kegiatan uji kelayakan sarana transportasi guna keselamatan penumpang;
 - d. Kegiatan pengendalian disiplin pengoperasian angkutan umum di jalan raya;
 - e. Kegiatan penciptaan keamanan dan kenyamanan penumpang di lingkungan terminal;
 - f. Kegiatan penataan tempat-tempat pemberhentian angkutan umum;
 - g. Kegiatan penciptaan disiplin dan pemeliharaan kebersihan di lingkungan terminal A;
 - h. Pengumpulan dan analisis data base pelayanan angkutan;
 - i. Pengembangan sarana dan prasarana pelayanan jasa angkutan;
 - j. Fasilitasi perijinan di bidang perhubungan;
 - k. Kegiatan pemilihan dan pemberian penghargaan sopir/juru mudi/awak kendaraan angkutan umum teladan;
 - l. Koordinasi dalam peningkatan pelayanan angkutan;
 - m. Kegiatan penciptaan disiplin dan pemeliharaan kebersihan di lingkungan terminal B.
4. Program Pengendalian dan Pengamanan Lalu Lintas, meliputi kegiatan :
- a. Pengadaan rambu-rambu lalu lintas;
 - b. Pengadaan marka jalan;
 - c. Pengadaan sarana dan prasarana perlengkapan jalan;
 - d. Pengendalian dan pengamanan lalu lintas di jalan;
 - e. Koordinasi dalam peningkatan pengendalian dan pengamanan lalu lintas.

Dinas Perhubungan Kabupaten Pemalang dituntut untuk mampu mengejawantahkan Visi Pembangunan Kabupaten Pemalang 2016 -2021,

melalui penetapan visi kelembagaan sebagai ukuran keberhasilan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan, yang sejalan dengan isu strategis yang dihadapi, dan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

3. Dinas Perhubungan Kabupaten Pematang Jaya

a. Visi

Untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas pelaksanaan program suatu instansi pemerintah harus terus menerus melakukan perubahan ke arah perbaikan. Perubahan tersebut harus disusun dalam suatu tahapan yang konsisten dan berkelanjutan, sehingga dapat meningkatkan Akuntabilitas dan Kinerja yang berorientasi pada pencapaian hasil.

Tahapan sebagaimana tersebut di atas, dimulai dengan perumusan visi yang jelas. Visi adalah cara pandang jauh ke depan ke mana instansi pemerintah harus dibawa agar Eksis, Antisipatif, dan Inovatif. Visi adalah suatu gambaran yang menantang tentang keadaan masa depan yang diinginkan instansi pemerintah. Visi tersebut harus mampu :

- Menarik, komitmen, dan menggerakkan orang;
- Menciptakan makna bagi kehidupan anggota organisasi;
- Menjembatani keadaan sekarang dan keadaan masa depan (yang akan datang).

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka Dinas Perhubungan Kabupaten Pematang Jaya mempunyai pernyataan visi sebagai berikut :

“Terwujudnya Pelayanan Jasa Transportasi yang Aman, Nyaman, yang handal efektif dan efisien, yang berdaya saing”.

Penjelasan Makna Visi

Dengan rumusan visi organisasi tersebut, maka perlu diberikan penjelasan sebagai berikut :

Pelayanan Jasa transportasi yang dilaksanakan secara profesional dan mudah diharapkan dapat menciptakan rasa aman dan nyaman yang

diperoleh masyarakat. Mampu meningkatkan hubungan antara pemerintah, pelaku bisnis, dan masyarakat umum. Adanya keterbukaan (transparansi) maka diharapkan hubungan antara berbagai pihak menjadi lebih baik. Keterbukaan ini menghilangkan saling curiga dan kekesalan dari semua pihak, sehingga tercipta masyarakat yang cerdas dan sejahtera.

b. Misi

Untuk dapat meraih terwujudnya visi tersebut di atas, maka perlu ditetapkan suatu misi, yaitu sasaran yang ingin dicapai dalam kurun waktu tertentu melalui penerapan strategi yang dipilih.

Misi Dinas Perhubungan Kabupaten Pematang Jaya adalah :

- 1) Mengembangkan manajemen transportasi darat yang memadai;
- 2) Meningkatkan jasa teknis pemeriksaan kendaraan bermotor;
- 3) Meningkatkan pembangunan dan pemeliharaan prasarana dan fasilitas perhubungan

Penjelasan Makna Misi

Makna dari misi Pertama adalah bahwa Pengembangan Manajemen Transportasi Darat dapat terciptanya peningkatan keselamatan, keamanan, dan kenyamanan, dan ketertiban berkendara merupakan wujud dari kedisiplinan para pengguna jalan.

Makna dari misi Kedua adalah bahwa Peningkatan Jasa Teknis Pemeriksaan Kendaraan Bermotor dilaksanakan untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat untuk dapat meningkatkan keselamatan berkendara di jalan pada umumnya, selain itu juga dapat meningkatkan SDM Penguji Kendaraan Bermotor yang profesional, dan juga dapat meningkatkan PAD.

Makna dari Misi Ketiga, Meningkatkan pembangunan dan pemeliharaan prasarana dan fasilitas perhubungan adalah

meningkatkan pembangunan dan pemeliharaan prasarana dan fasilitas perhubungan berupa terminal, halte, dan alat pengamanan perlintasan KA dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada masyarakat pengguna jasa transportasi dan meningkatkan keselamatan transportasi jalan.

Makna dari Misi Keempat, Meningkatkan kapasitas Sumber Daya Manusia (SDM) bidang Perhubungan dalam rangka peningkatan daya saing dan profesionalisme adalah meningkatkan kualitas dan kuantitas SDM aparatur pemerintah dalam rangka memberikan pelayanan prima kepada masyarakat.

4. Permasalahan

Adapun permasalahan yang muncul dalam rangka mewujudkan misi tersebut adalah:

- 1) Adanya kewenangan yang berjenjang dalam pengadaan perlengkapan jalan berdasarkan tingkat jalan;
- 2) Pembangunan dan pengembangan sarana dan prasarana perlengkapan jalan yang belum terarah;
- 3) Masih kurangnya kualitas sumberdaya manusia;
- 4) Belum semua Kabupaten/Kota menerapkan Pengujian Kendaraan Bermotor berbasis on-line/smart card;
- 5) Kurangnya peran aktif Dinas Perhubungan Kabupaten Pemalang di masyarakat.

Selain permasalahan tersebut di atas, masih banyak hal-hal yang perlu dilakukan untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dari Dinas Perhubungan Kabupaten Pemalang, mengingat masih adanya kekurangan atau hal-hal yang harus dilakukan, antara lain :

- sudah pudar/hilangnya marka jalan dan *zebracross*, terutama yang terdapat di jalan-jalan protokol ibukota kabupaten dan di depan sekolah-sekolah;

- kurang tertibnya parkir yang ada di badan jalan, di jalan-jalan protokol yang melalui kawasan/pusat perdagangan di ibukota kabupaten;
- masih kurangnya rambu-rambu lalu lintas untuk jalan-jalan kabupaten yang menghubungkan antar kecamatan di wilayah Kabupaten Pematang Jaya;
- Hilangnya beberapa rambu lalu lintas yang telah dipasang, karena kurangnya pengertian masyarakat akan arti pentingnya rambu lalu lintas bagi pengguna jalan.

3.2 Tujuan dan Sasaran Rencana Kerja SKPD

Berdasarkan tugas dan fungsi yang diemban Dinas Perhubungan dengan segala isu-isu serta permasalahannya yang telah dipaparkan dalam BAB II, maka Renja Dinas Perhubungan mempunyai tujuan dan sasaran agar visi dan misi yang telah ditetapkan dalam jangka waktu lima tahun dapat tercapai.

1. Tujuan dan Sasaran

Rumusan tujuan dan sasaran Dinas Perhubungan adalah sebagai berikut :

- a. **Mewujudkan rencana serta potensi pengembangan wilayah dalam suatu kerangka sistem transportasi terpadu**, dengan sasaran :
 - 1) Meningkatnya perencanaan pembangunan prasarana dan fasilitas perhubungan
 - 2) Meningkatnya ketertiban, kelancaran, dan keselamatan lalu lintas jalan
 - 3) Meningkatnya pelayanan angkutan yang mendukung keselamatan transportasi jalan
- b. **Meningkatkan kualitas pelayanan jasa teknis pemeriksaan kendaraan bermotor**, dengan sasaran :
 - 1) Meningkatnya pelayanan teknis pemeriksaan kendaraan bermotor
 - 2) Meningkatnya pemeliharaan sarana dan prasarana pengujian kendaraan bermotor

- c. **Meningkatkan infrastruktur prasarana dan fasilitas perhubungan**, dengan sasaran :
 - 1) Meningkatnya pembangunan dan pemeliharaan prasarana dan fasilitas perhubungan

- d. **Meningkatkan efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan daerah**, dengan sasaran :
 - 1) Meningkatnya kualitas pelayanan administrasi
 - 2) Meningkatnya sarana dan prasarana perkantoran
 - 3) Meningkatnya kualitas SDM
 - 4) Meningkatnya kualitas perencanaan kegiatan dan pengelolaan keuangan daerah
 - 5) Meningkatnya pelayanan kepada masyarakat

2. Strategi dan Arah Kebijakan

a. Strategi

Strategi untuk mencapai Tujuan 1 (*Meningkatnya ketersediaan sarana transportasi umum bagi masyarakat*), yaitu :

- a. Meningkatkan pengelolaan perparkiran
- b. Meningkatkan pengadaan rambu lalu lintas, marka jalan, dan sarana dan prasarana perlengkapan jalan
- c. Meningkatkan pemeliharaan prasarana dan perlengkapan jalan
- d. Meningkatkan pelayanan perizinan angkutan umum
- e. Meningkatkan ketertiban lalu lintas dan keselamatan transportasi

Strategi untuk mencapai Tujuan 2 (*Meningkatkan kualitas pelayanan jasa teknis pemeriksaan kendaraan bermotor*), yaitu :

- 1) Meningkatkan pelayanan pengujian berkala kendaraan bermotor
- 2) Meningkatkan pemeliharaan sarana dan prasarana pengujian kendaraan bermotor

Strategi untuk mencapai Tujuan 3 (*Meningkatkan infrastruktur prasarana dan fasilitas perhubungan*), yaitu :

- 1) Meningkatkan pembangunan dan pemeliharaan terminal
- 2) Meningkatkan pembangunan dan pemeliharaan shelter dan halte
- 3) Meningkatkan pembangunan dan pemeliharaan alat pengaman perlintasan sebidang

Strategi untuk mencapai Tujuan 4 (*Meningkatkan efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan daerah*), yaitu :

- 1) Meningkatkan sarana dan prasarana publik
- 2) Meningkatkan kapasitas dan profesionalisme aparatur pemerintah daerah melalui pelatihan dan bintek bagi aparatur perhubungan
- 3) Meningkatkan transparansi dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan melalui monitoring, evaluasi dan pelaporan keuangan dan pembangunan
- 4) Meningkatkan pelayanan angkutan dan terminal.

b. Arah Kebijakan

Arah Kebijakan untuk mencapai **Tujuan 1** (*Mewujudkan rencana serta potensi pengembangan wilayah dalam suatu kerangka sistem transportasi terpadu*), yaitu :

- 1) Peningkatan sistem perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan dalam pembangunan prasarana dan fasilitas perhubungan.
- 2) Peningkatan pengelolaan perparkiran.
- 3) Peningkatan pengadaan rambu lalu lintas, marka jalan, dan sarana dan prasarana perlengkapan jalan.
- 4) Peningkatan pemeliharaan prasarana dan perlengkapan jalan
- 5) Peningkatan pelayanan perizinan angkutan umum
- 6) Peningkatan ketertiban lalu lintas dan keselamatan transportasi

Arah Kebijakan untuk mencapai **Tujuan 2** (*Meningkatkan kualitas pelayanan jasa teknis pemeriksaan kendaraan bermotor*), yaitu :

- 1) Peningkatan pelayanan pengujian berkala kendaraan bermotor
- 2) Peningkatan pemeliharaan sarana dan prasarana pengujian kendaraan bermotor

Arah Kebijakan untuk mencapai **Tujuan 3** (*Meningkatkan infrastruktur prasarana dan fasilitas perhubungan*), yaitu :

- 1) Peningkatan pembangunan dan pemeliharaan terminal
- 2) Peningkatan pembangunan dan pemeliharaan shelter dan halte
- 3) Peningkatan pembangunan dan pemeliharaan alat pengamananan perlintasan sebidang

Arah Kebijakan untuk mencapai **Tujuan 4** (*Meningkatkan efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan daerah*), yaitu :

- 1) Peningkatan penyediaan sarana dan prasarana pelayanan publik.
 - 2) Peningkatan pelatihan dan bintek bagi aparatur perhubungan,
 - 3) Peningkatan pengawasan pelaksanaan program pembangunan daerah.
 - 4) Peningkatan pelayanan angkutan dan terminal.
1. Program Pembangunan Sarana dan Prasarana Perhubungan, yaitu dengan melaksanakan kegiatan :
 - a. Pembangunan Gedung Terminal;
 - b. Pembangunan Sarana dan Prasarana Perkeretaapian.
 2. Program Pengendalian dan Pengamanan Lalu Lintas, yaitu dengan melaksanakan kegiatan :
 - a. Pengadaan Rambu-rambu Lalu Lintas;
 - b. Pengadaan Marka Jalan;
 - c. Pengadaan Sarana dan Prasarana Perlengkapan Jalan;
 - d. Pengendalian dan Pengamanan Lalu Lintas di Jalan;
 - e. Koordinasi dalam Peningkatan Pengendalian dan Pengamanan Lalu Lintas.

Sedangkan Strategi dan Kebijakan Dinas Perhubungan Kabupaten Pematang Siantar sesuai dengan RPJMD Kabupaten Pematang Siantar maka strategi dan kebijakan Dinas Perhubungan Kabupaten Pematang Siantar dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

1. Meningkatkan Sarana Prasarana Dasar Serta Memperkuat Sentra-Sentra Produksi Berbasis Kewilayahan Seseuai Dengan Karakteristik Dan Potensi Wilayah.

Strategi:

- 1) Meningkatkan sarana dan prasarana perhubungan, dan perbaikan sistem manajemen transportasi.

Kebijakan:

- 1) Peningkatan sarana dan prasarana penunjang keselamatan dalam berlalu lintas.

Tabel 3.1
STRATEGI DAN KEBIJAKAN

NO	STRATEGI	KEBIJAKAN
1	Meningkatkan sarana dan prasarana perhubungan, dan perbaikan sistem manajemen transportasi	Peningkatan sarana dan prasarana penunjang keselamatan dalam berlalu lintas

3.3 Program dan Kegiatan PD

Program dan kegiatan Dinas Perhubungan Tahun 2020 merupakan penjabaran dari Renstra Dinas Tahun 2016- 2021 yang bereferensi pada RPJM Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2016- 2021. Program dan kegiatan tersebut dimaksudkan sebagai arah kinerja SKPD dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas serta terjaminnya kesinambungan pelaksanaan pembangunan antara Pemerintah Kabupaten Pemalang dan PD yang menjadi bidang tugas.

Disamping kedudukan yang demikian, program dan kegiatan Dinas Tahun 2020 diharapkan dapat mengakomodasi aspirasi masyarakat serta tolok ukur pencapaian arah kebijakan, visi dan misi Bupati Pemalang yang tertuang dalam RPJM Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2016– 2021.

Dari prioritas tersebut, Dinas Perhubungan Kabupaten Pemalang menetapkan beberapa sasaran seperti tersebut di atas. Untuk mendukung tercapainya

sasaran strategis tersebut, diperlukan dukungan oleh segenap komponen organisasi yang terintegrasi dalam rencana program dan kegiatan terpadu.

Rencana program dan kegiatan Dinas Perhubungan Kabupaten Pematang Jaya pada Tahun 2020 sebagai berikut :

1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
 - a. Penyediaan jasa surat menyurat
 - b. Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air, dan listrik
 - c. Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor
 - d. Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional
 - e. Penyediaan jasa kebersihan kantor
 - f. Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja
 - g. Penyediaan alat tulis kantor
 - h. Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
 - i. Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan
 - j. Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
 - k. Penyediaan makanan dan minuman
 - l. Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi di dalam dan ke luar daerah
 - m. Penyediaan jasa keamanan
2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
 - a. Pengadaan perlengkapan gedung kantor
 - b. Pengadaan Mebeleur
 - c. Pengadaan komputer dan perlengkapannya
 - d. Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
 - e. Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
 - f. Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor
 - g. Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur
 - h. Pemeliharaan rutin/berkala komputer dan perlengkapannya
3. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
 - a. Pelatihan teknis pelaksanaan tupoksi SKPD

4. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
 - a. Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD
 - b. Penyusunan pelaporan keuangan semesteran
 - c. Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun
 - d. Monitoring, evaluasi dan pelaporan
5. Program Peningkatan Perencanaan dan Penganggaran SKPD
 - a. Penyusunan dokumen perencanaan dan penganggaran SKPD
6. Program Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan
 - a. Penyusunan kebijakan, norma, standar dan prosedur bidang perhubungan
 - b. Koordinasi dalam pembangunan prasarana dan fasilitas perhubungan
 - c. Sosialisasi kebijakan di bidang perhubungan
 - d. Peningkatan pengelolaan terminal angkutan darat
 - e. Peningkatan pengelolaan parkir di tepi jalan umum
 - f. Inventarisasi data sarana, prasarana dan fasilitas perhubungan
 - g. Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan
7. Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas LLAJ
 - a. Rehabilitasi/pemeliharaan sarana alat pengujian kendaraan bermotor
 - b. Rehabilitasi/pemeliharaan balai pengujian kendaraan bermotor
 - c. Rehabilitasi/pemeliharaan terminal/pelabuhan
 - d. Rehabilitasi/pemeliharaan rambu-rambu lalu lintas
 - e. Rehabilitasi/pemeliharaan halte
 - f. Rehabilitasi/pemeliharaan sarana dan prasarana perlintasan KA
8. Program Peningkatan Pelayanan Angkutan
 - a. Kegiatan uji kelayakan sarana transportasi guna keselamatan penumpang
 - b. Kegiatan pengendalian disiplin pengoperasian angkutan umum di jalan
 - c. Kegiatan penciptaan keamanan dan kenyamanan penumpang di lingkungan terminal

- d. Kegiatan penciptaan disiplin dan pemeliharaan kebersihan di lingkungan terminal A
- e. Pengumpulan dan analisis data base pelayanan angkutan
- f. Pengembangan sarana dan prasarana pelayanan jasa angkutan
- g. Fasilitasi Perizinan di bidang Perhubungan
- h. Kegiatan pemilihan dan pemberian penghargaan sopir/juru mudi/ awak kendaraan angkutan umum teladan
- i. Koordinasi dalam peningkatan pelayanan angkutan
- j. Kegiatan penciptaan disiplin dan pemeliharaan kebersihan di lingkungan terminal B

9. Program Pembangunan Sarana dan Prasarana Perhubungan

- a. Pembangunan gedung terminal

10. Program Pengendalian dan Pengamanan Lalu Lintas

- a. Pengadaan Rambu-rambu Lalu Lintas
- b. Pengadaan Marka Jalan
- c. Pengadaan Sarana dan Prasarana Perlengkapan Jalan
- d. Pengendalian dan Pengamanan Lalu Lintas di Jalan
- e. Koordinasi dalam Peningkatan Pengendalian dan Pengamanan Lalu Lintas

Tabel 3.2

Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2020
Kabupaten Pemalang

SKPD : Dinas Perhubungan

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif Tahun 2021 (Rp)	Prakiraan Maju Tahun 2022 (Rp)	Jenis Kegiatan (1/2/3)	SKPD	
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan						
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
	DINAS PERHUBUNGAN										15,780,950,000	16,287,655,200			
1	9		Perhubungan								15,780,950,000	16,287,655,200			
1	9	1	Program pelayanan administrasi perkantoran			Prosentase tersedianya pelayanan administrasi perkantoran untuk meningkatkan kinerja terhadap kebutuhan					1,535,133,000	1,670,526,300			
1	9	1	1	Penyediaan jasa surat menyurat	Keberlanjutan peningkatan kualitas dan kuantitas pelayanan infrastruktur dan pemerataannya antar wilayah guna penguatan arus barang dan jasa	Terciptanya peningkatan kapasitas sumber daya aparatur untuk mendukung peningkatan kualitas dan kuantitas pelayanan infrastruktur dan pemerataannya antar wilayah guna penguatan arus barang dan jasa	Pemalang	Jumlah surat yang terkirim dan tersampaikan dengan baik	3.500 surat	Tersampainya surat dengan baik	100%	18,865,000	20,751,500	1	Dishub
1	9	1	2	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air, dan listrik	Keberlanjutan peningkatan kualitas dan kuantitas pelayanan infrastruktur dan pemerataannya antar wilayah guna penguatan arus barang dan jasa	Terciptanya peningkatan kapasitas sumber daya aparatur untuk mendukung peningkatan kualitas dan kuantitas pelayanan infrastruktur dan pemerataannya antar wilayah guna penguatan arus barang dan jasa	Pemalang	Jumlah sumber daya yang tercukupi	3 jenis, 12 bulan	Terpenuhinya dukungansumber daya energi untuk pelayanan administasi perkantoran	100%	181,200,000	181,200,000.00	1	Dishub

1	9	1	3	Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor	Keberlanjutan peningkatan kualitas dan kuantitas pelayanan infrastruktur dan pemerataannya antar wilayah guna penguatan arus barang dan jasa	Terciptanya peningkatan kapasitas sumber daya aparatur untuk mendukung peningkatan kualitas dan kuantitas pelayanan infrastruktur dan pemerataannya antar wilayah guna penguatan arus barang dan jasa	Pemalang			Jasa peralatan dan perlengkapan kantor yang terpenuhi	1 unit, 12 bulan	Terpenuhinya kebutuhan peralatan dan perlengkapan kantor dalam pelayanan administrasi perkantoran	100%	6,400,000	7,040,000	1	Dishub
1	9	1	6	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/ operasional	Keberlanjutan peningkatan kualitas dan kuantitas pelayanan infrastruktur dan pemerataannya antar wilayah guna penguatan arus barang dan jasa	Terciptanya peningkatan kapasitas sumber daya aparatur untuk mendukung peningkatan kualitas dan kuantitas pelayanan infrastruktur dan pemerataannya antar wilayah guna penguatan arus barang dan jasa	Pemalang			Jumlah pembayaran pajak kendaraan dinas/ operasional	38 kend	Terpenuhinya kendaraan dinas/ operasional dalam kondisi baik	100%	36,900,000	40,590,000	1	Dishub
1	9	1	8	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Keberlanjutan peningkatan kualitas dan kuantitas pelayanan infrastruktur dan pemerataannya antar wilayah guna penguatan arus barang dan jasa	Terciptanya peningkatan kapasitas sumber daya aparatur untuk mendukung peningkatan kualitas dan kuantitas pelayanan infrastruktur dan pemerataannya antar wilayah guna penguatan arus barang dan jasa	Pemalang			Jumlah petugas kebersihan dan peralatan perkantoran yang tersedia	26 orang, 12 bulan	Terpenuhinya kebersihan lingkungan kerja dengan baik	100%	237,000,000	260,700,000	1	Dishub
1	9	1	9	Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja	Keberlanjutan peningkatan kualitas dan kuantitas pelayanan infrastruktur dan pemerataannya antar wilayah guna penguatan arus barang dan jasa	Terciptanya peningkatan kapasitas sumber daya aparatur untuk mendukung peningkatan kualitas dan kuantitas pelayanan infrastruktur dan pemerataannya antar wilayah guna penguatan arus barang dan jasa	Pemalang			Kebutuhan perbaikan peralatan kerja	1 jenis	Terpenuhinya kebutuhan peralatan kerja dalam kondisi baik	100%	6,000,000	6,600,000	1	Dishub
1	9	1	10	Penyediaan alat tulis kantor	Keberlanjutan peningkatan kualitas dan kuantitas pelayanan infrastruktur dan pemerataannya antar wilayah guna penguatan arus barang dan jasa	Terciptanya peningkatan kapasitas sumber daya aparatur untuk mendukung peningkatan kualitas dan kuantitas pelayanan infrastruktur dan pemerataannya antar wilayah guna penguatan arus barang dan jasa	Pemalang			tersedianya alat tulis kantor	1 paket, 1 tahun	Terpenuhinya kebutuhan alat tulis kantor untuk pelayanan administrasi perkantoran	100%	15,514,500	17,065,950	1	Dishub
1	9	1	11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Keberlanjutan peningkatan kualitas dan kuantitas pelayanan infrastruktur dan pemerataannya antar wilayah guna penguatan arus barang dan jasa	Terciptanya peningkatan kapasitas sumber daya aparatur untuk mendukung peningkatan kualitas dan kuantitas pelayanan infrastruktur dan pemerataannya antar wilayah guna penguatan arus barang dan jasa	Pemalang			Tersedianya barang cetakan, penggandaan, dan publikasi	4 paket (buku uji, plat uji, cetakan (karcis, formulir-formulir) dan stiker uji)	Terpenuhinya kebutuhan barang cetakan, penggandaan dan publikasi untuk pelayanan administrasi perkantoran	100%	298,903,000	328,793,300	1	Dishub

1	9	1	12	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Keberlanjutan peningkatan kualitas dan kuantitas pelayanan infrastruktur dan pemerataannya antar wilayah guna penguatan arus barang dan jasa	Terciptanya peningkatan kapasitas sumber daya aparatur untuk mendukung peningkatan kualitas dan kuantitas pelayanan infrastruktur dan pemerataannya antar wilayah guna penguatan arus barang dan jasa	Pemalang			tersedianya peralatan listrik	2 jenis, 1 tahun (perawatan instalasi listrik dan pemasangan LPJU di terminal)	Terpenuhinya kebutuhan peralatan listrik dalam kondisi baik untuk mendukung pelayanan administrasi perkantoran	100%	24,500,000	26,950,000	1	Dishub
1	9	1	15	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Keberlanjutan peningkatan kualitas dan kuantitas pelayanan infrastruktur dan pemerataannya antar wilayah guna penguatan arus barang dan jasa	Terciptanya peningkatan kapasitas sumber daya aparatur untuk mendukung peningkatan kualitas dan kuantitas pelayanan infrastruktur dan pemerataannya antar wilayah guna penguatan arus barang dan jasa	Pemalang			Tersedianya bahan bacaan berupa surat kabar	3 jenis, 12 bulan	Terpenuhinya kebutuhan bahan bacaan	100%	5,340,000	5,874,000	1	Dishub
1	9	1	17	Penyediaan makanan dan minuman	Keberlanjutan peningkatan kualitas dan kuantitas pelayanan infrastruktur dan pemerataannya antar wilayah guna penguatan arus barang dan jasa	Terciptanya peningkatan kapasitas sumber daya aparatur untuk mendukung peningkatan kualitas dan kuantitas pelayanan infrastruktur dan pemerataannya antar wilayah guna penguatan arus barang dan jasa	Pemalang			Tersedianya makanan dan minuman	10 jenis, 12 bulan	Terpenuhinya kebutuhan makanan dan minuman pegawai untuk meningkatkan pelayanan administrasi perkantoran jenis, 12 bulannaanrat kabarritasi di dalam dan ke luar daerah	100%	69,110,500	76,021,550	1	Dishub
1	9	1	18	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi di dalam dan ke luar daerah	Keberlanjutan peningkatan kualitas dan kuantitas pelayanan infrastruktur dan pemerataannya antar wilayah guna penguatan arus barang dan jasa	Terciptanya peningkatan kapasitas sumber daya aparatur untuk mendukung peningkatan kualitas dan kuantitas pelayanan infrastruktur dan pemerataannya antar wilayah guna penguatan arus barang dan jasa	Pemalang			Terlaksananya rapat konsultasi dan keikutsertaan pada rapat koordinasi dalam satu tahun	12 bulan	Terpenuhinya kebutuhan informasi dalam pembangunan daerah untuk meningkatkan pelayanan administrasi perkantoran	100%	250,000,000	275,000,000	1	Dishub
1	9	1	19	Penyediaan jasa keamanan	Keberlanjutan peningkatan kualitas dan kuantitas pelayanan infrastruktur dan pemerataannya antar wilayah guna penguatan arus barang dan jasa	Terciptanya peningkatan kapasitas sumber daya aparatur untuk mendukung peningkatan kualitas dan kuantitas pelayanan infrastruktur dan pemerataannya antar wilayah guna penguatan arus barang dan jasa	Pemalang			Jumlah petugas keamanan kantor, terminal, dan parkir	31 org, 12 bulan, 1 jenis 12 bulan.	Terpenuhinya keamanan di lingkungan kerja dengan baik jenis, 12 bulannaanrat kabarritasi di dalam dan ke luar daerah	100%	385,400,000	423,940,000	1	Dishub
1	9	2		Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur					Prosentase meningkatnya sarana prasarana aparatur untuk menunjang peningkatan kinerja				100%	487,795,000	282,529,500		

1	9	2	5	Pengadaan kendaraan dinas/ operasional	Keberlanjutan peningkatan kualitas dan kuantitas pelayanan infrastruktur dan pemerataannya antar wilayah guna penguatan arus barang dan jasa	Terciptanya peningkatan kapasitas sumber daya aparatur untuk mendukung peningkatan kualitas dan kuantitas pelayanan infrastruktur dan pemerataannya antar wilayah guna penguatan arus barang dan jasa	Pemalang			Kendaraan dinas double cabin	Meningkatnya sarana mobilitas untuk menunjang peningkatan kinerja aparatur	100%	70,000,000	77,000,000	1	Dishub
1	9	2	7	Pengadaan perlengkapan gedung kantor	Keberlanjutan peningkatan kualitas dan kuantitas pelayanan infrastruktur dan pemerataannya antar wilayah guna penguatan arus barang dan jasa	Terciptanya peningkatan kapasitas sumber daya aparatur untuk mendukung peningkatan kualitas dan kuantitas pelayanan infrastruktur dan pemerataannya antar wilayah guna penguatan arus barang dan jasa	Pemalang			Perlengkapan gedung kantor	Meningkatnya sarana dan prasarana gedung kantor untuk menunjang peningkatan kinerja aparatur	100%	16,000,000	17,600,000	1	Dishub
1	9	2	10	Pengadaan mebeleur	Penigkatan Tata Kelola Pemerintahan yang baik dalam mendukung Pelayanan Publik	Terciptanya peningkatan kapabilitas sumber daya aparatur dalam Tata Kelola Pemerintahan yang baik dalam mendukung Pelayanan Publik	Pemalang			Tersedianya Mebeleur kantor	Prosentase terlaksananya Pengadaan mebeleur	100%	0	0	1	Dishub
1	9	2	11	Pengadaan Komputer dan Perlengkapannya	Penigkatan Tata Kelola Pemerintahan yang baik dalam mendukung Pelayanan Publik	Terciptanya peningkatan kapabilitas sumber daya aparatur dalam Tata Kelola Pemerintahan yang baik dalam mendukung Pelayanan Publik	Pemalang			Tersedianya komputer dan perlengkapannya	Prosentase terlaksananya pengadaan komputer dan perlengkapannya.	100%	11,135,000	12,248,500	1	Dishub
1	9	2	22	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Keberlanjutan peningkatan kualitas dan kuantitas pelayanan infrastruktur dan pemerataannya antar wilayah guna penguatan arus barang dan jasa	Terciptanya peningkatan kapasitas sumber daya aparatur untuk mendukung peningkatan kualitas dan kuantitas pelayanan infrastruktur dan pemerataannya antar wilayah guna penguatan arus barang dan jasa	Pemalang			Terpeliharanya gedung kantor dalam satu tahun	Gedung kantor dalam kondisi baik untuk menunjang peningkatan kinerja aparatur	100%	230,950,000	165.935.000		Dishub
1	9	2	24	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Keberlanjutan peningkatan kualitas dan kuantitas pelayanan infrastruktur dan pemerataannya antar wilayah guna penguatan arus barang dan jasa	Terciptanya peningkatan kapasitas sumber daya aparatur untuk mendukung peningkatan kualitas dan kuantitas pelayanan infrastruktur dan pemerataannya antar wilayah guna penguatan arus barang dan jasa	Pemalang			Terpeliharanya kendaraan dinas/ operasional dalam satu tahun	Kendaraan dinas/operasional dalam kondisi baik untuk menunjang peningkatan kinerja aparatur	100%	93,920,000	103,312,000	1	Dishub

1	9	2	26	Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor	Keberlanjutan peningkatan kualitas dan kuantitas pelayanan infrastruktur dan pemerataannya antar wilayah guna penguatan arus barang dan jasa	Terciptanya peningkatan kapasitas sumber daya aparatur untuk mendukung peningkatan kualitas dan kuantitas pelayanan infrastruktur dan pemerataannya antar wilayah guna penguatan arus barang dan jasa	Pemalang			Terpeliharanya perlengkapan gedung kantor dalam satu tahun	3 jenis, 1 tahun	Perengkapan gedung kantor dalam kondisi baik untuk menunjang peningkatan kinerja aparatur	100%	15,790,000	17,369,000	1	Dishub
1	9	2	29	Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur.	Peningkatan tata kelola pemerintahan yang baik dalam mendukung pelayanan public	Terciptanya peningkatan kapasitas sumber daya aparatur untuk mendukung peningkatan kualitas dan kuantitas pelayanan infrastruktur dan pemerataannya antar wilayah guna penguatan arus barang dan jasa	Pemalang			Ter peliharanya mebeleur kantor dalam satu tahun	12 bulan	Mebeleur kantor dalam kondisi baik untuk menunjang peningkatan kinerja aparatur	100%	15,000,000	16,500,000	1	Dishub
1	9	2	30	Pemeliharaan rutin/berkala komputer dan perlengkapannya	Keberlanjutan peningkatan kualitas dan kuantitas pelayanan infrastruktur dan pemerataannya antar wilayah guna penguatan arus barang dan jasa	Terciptanya peningkatan kapasitas sumber daya aparatur untuk mendukung peningkatan kualitas dan kuantitas pelayanan infrastruktur dan pemerataannya antar wilayah guna penguatan arus barang dan jasa	Pemalang			Terpeliharanya komputer dan perlengkapannya dalam satu tahun	47 unit	Komputer dalam kondisi baik untuk menunjang peningkatan kinerja aparatur	100%	35,000,000	38,500,000		Dishub
1	9	3		Program peningkatan disiplin aparatur					Prosentase tingkat kedisiplinan aparatur	100%				-	-		
1	9	3	2	Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya	Keberlanjutan peningkatan kualitas dan kuantitas pelayanan infrastruktur dan pemerataannya antar wilayah guna penguatan arus barang dan jasa	Terciptanya peningkatan kapasitas sumber daya aparatur untuk mendukung peningkatan kualitas dan kuantitas pelayanan infrastruktur dan pemerataannya antar wilayah guna penguatan arus barang dan jasa	Pemalang			Terpenuhinya pakaian dinas untuk PNS Dishub	10 paket	Pakaian dinas beserta perlengkapannya untuk menunjang peningkatan kinerja aparatur	100%	-	-	1	Dishub
1	9	5		Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur					Prosentase terwujudnya peningkatan kapasitas sumber daya aparatur	100%				230,485,000	253,533,500		
1	9	5	4	Pelatihan teknis pelaksanaan tupoksi SKPD	Keberlanjutan peningkatan kualitas dan kuantitas pelayanan infrastruktur dan pemerataannya antar wilayah guna penguatan arus barang dan jasa	Terciptanya peningkatan kapasitas sumber daya aparatur untuk mendukung peningkatan kualitas dan kuantitas pelayanan infrastruktur dan pemerataannya antar wilayah guna penguatan arus barang dan jasa	Pemalang			Terlaksananya pelatihan/diklat/ bintek dan pengiriman peserta diklat/ bintek dalam satu tahun	91 peserta	Meningkatnya kapasitas/ kemampuan SDM dan kinerja aparatur	100%	230,485,000	253,533,500	1	Dishub

1	9	6		Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan aparaturlalam dan pengiriman peserta diklat/ bintek dalam satu tahun				Prosentase tersusunnya laporan capaian kinerja dan keuangan lima tahunan	100%				65,648,000	72,212,800			
1	9	6	1	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Keberlanjutan peningkatan kualitas dan kuantitas pelayanan infrastruktur dan pemerataannya antar wilayah guna penguatan arus barang dan jasa	Terciptanya peningkatan kapasitas sumber daya aparatur untuk mendukung peningkatan kualitas dan kuantitas pelayanan infrastruktur dan pemerataannya antar wilayah guna penguatan arus barang dan jasa	Pemalang			Tersusunnya laporan capaian kinerja dan realisasi keuangan dalam satu tahun	31 laporan	Terpenuhiya tanggung jawab SKPD melalui laporan capaian kinerja	100%	31,988,000	35,186,800	1	Dishub
1	9	6	2	Penyusunan pelaporan keuangan semesteran	Keberlanjutan peningkatan kualitas dan kuantitas pelayanan infrastruktur dan pemerataannya antar wilayah guna penguatan arus barang dan jasa	Terciptanya peningkatan kapasitas sumber daya aparatur untuk mendukung peningkatan kualitas dan kuantitas pelayanan infrastruktur dan pemerataannya antar wilayah guna penguatan arus barang dan jasa	Pemalang			Tersusunnya laporan keuangan semesteran dalam satu tahun	1 laporan	Terpenuhiya tanggung jawab SKPD melalui laporan keuangan dan kinerja dalam satu semester	100%	3,930,000	4,323,000	1	Dishub
1	9	6	4	Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun	Keberlanjutan peningkatan kualitas dan kuantitas pelayanan infrastruktur dan pemerataannya antar wilayah guna penguatan arus barang dan jasa	Terciptanya peningkatan kapasitas sumber daya aparatur untuk mendukung peningkatan kualitas dan kuantitas pelayanan infrastruktur dan pemerataannya antar wilayah guna penguatan arus barang dan jasa	Pemalang			Tersusunnya laporan keuangan tahunan	1 laporan	Terpenuhiya tanggung jawab SKPD melalui laporan keuangan dan kinerja SKPD selama satu tahun	100%	4,860,000	5,346,000	1	Dishub
1	9	6	9	Monitoring, evaluasi dan pelaporan	Keberlanjutan peningkatan kualitas dan kuantitas pelayanan infrastruktur dan pemerataannya antar wilayah guna penguatan arus barang dan jasa	Terciptanya peningkatan kapasitas sumber daya aparatur untuk mendukung peningkatan kualitas dan kuantitas pelayanan infrastruktur dan pemerataannya antar wilayah guna penguatan arus barang dan jasa	Pemalang			Terlaksananya monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan selama satu tahun	7 laporan	Terpenuhiya tanggung jawab SKPD melalui laporan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan selama satu tahun	100%	24,870,000	27,357,000	1	Dishub
1	9	9		Program Peningkatan Perencanaan dan Penganggaran SKPD				Prosentase terwujudnya peningkatan perencanaan dan penganggaran SKPD	100%					52,950,000	58,245,000		

1	9	9	2	Penyusunan dokumen perencanaan dan penganggaran SKPD	Keberlanjutan peningkatan kualitas dan kuantitas pelayanan infrastruktur dan pemerataannya antar wilayah guna penguatan arus barang dan jasa	Terciptanya peningkatan kapasitas sumber daya aparatur untuk mendukung peningkatan kualitas dan kuantitas pelayanan infrastruktur dan pemerataannya antar wilayah guna penguatan arus barang dan jasa	Pemalang			Tersusunnya dokumen perencanaan dan anggaran pelaksanaan kegiatan dalam satu tahun	6 dokumen	Terpenuhinya tanggung jawab SKPD melalui penyusunan dokumen rencana kerja dan dokumen anggaran dalam satu tahun	100%	52,950,000	58,245,000	1	Dishub
1	9	15		Program Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan				Prosentase terwujudnya pembangunan prasarana dan fasilitas perhubungan	100%					851,011,500	343,007,500		
1	9	15	1	Perencanaan pembangunan prasarana dan fasilitas perhubungan	Keberlanjutan peningkatan kualitas dan kuantitas pelayanan infrastruktur dan pemerataannya antar wilayah guna penguatan arus barang dan jasa	Terciptanya peningkatan kapasitas sumber daya aparatur untuk mendukung peningkatan kualitas dan kuantitas pelayanan infrastruktur dan pemerataannya antar wilayah guna penguatan arus barang dan jasa				Terlaksananya Perencanaan pembangunan prasarana dan fasilitas perhubungan		Meningkatnya prasarana dan fasilitas perhubungan	100%		-	1	Dishub
1	9	15	2	Penyusunan Kebijakan, norma, standard an prosedur bidang perhubungan	Meningkatkan sarana prasarana dasar serta memperkuat sentra-sentra produksi berbasis kewilayahan	Meningkatkan kemudahan akses transportasi masyarakat	Pemalang		100%	Terlaksananya kegiatan penyusunan Raperda LLAJ	2 Perbub	Terlaksananya kegiatan Penyusunan Kebijakan, norma, standard an prosedur bidang perhubungan	100%	39,735,000	43,708,500		Dishub
1	9	15	3	Koordinasi dalam pembangunan prasarana dan fasilitas perhubungan	Keberlanjutan peningkatan kualitas dan kuantitas pelayanan infrastruktur dan pemerataannya antar wilayah guna penguatan arus barang dan jasa	Terciptanya peningkatan kapasitas sumber daya aparatur untuk mendukung peningkatan kualitas dan kuantitas pelayanan infrastruktur dan pemerataannya antar wilayah guna penguatan arus barang dan jasa	Pemalang			Terlaksananya koordinasi bidang perhubungan dalam pembangunan prasarana dan fasilitas perhubungan	1 kgt	Meningkatnya kualitas pembangunan prasarana dan fasilitas perhubungan	100%	77,500,000	85,250,000	1	Dishub
1	9	15	4	Sosialisasi kebijakan di bidang perhubungan	Keberlanjutan peningkatan kualitas dan kuantitas pelayanan infrastruktur dan pemerataannya antar wilayah guna penguatan arus barang dan jasa	Terciptanya peningkatan kapasitas sumber daya aparatur untuk mendukung peningkatan kualitas dan kuantitas pelayanan infrastruktur dan pemerataannya antar wilayah guna penguatan arus barang dan jasa	Pemalang			Terlaksananya sosialisasi kebijakan di bidang perhubungan	2 kgt	Tersampainya kebijakan di bidang perhubungan kepada masyarakat	100%	182,710,000	200,981,000	1	Dishub
1	9	15	7	Peningkatan pengelolaan terminal angkutan darat	Keberlanjutan peningkatan kualitas dan kuantitas pelayanan infrastruktur dan pemerataannya antar wilayah guna penguatan arus barang dan jasa	Terciptanya peningkatan kapasitas sumber daya aparatur untuk mendukung peningkatan kualitas dan kuantitas pelayanan infrastruktur dan pemerataannya antar wilayah guna penguatan arus barang dan jasa	Pemalang			Terlaksananya pembinaan terhadap petugas terminal dan tersedianya data kinerja terminal selama satu tahun	1 kgt	Meningkatnya pengelolaan dan fungsi terminal	100%	11,880,000	13,068,000	1	Dishub

1	9	15	10	Peningkatan pengelolaan parkir di tepi jalan	Keberlanjutan peningkatan kualitas dan kuantitas pelayanan infrastruktur dan pemerataannya antar wilayah guna penguatan arus barang dan jasa	Terciptanya peningkatan kapasitas sumber daya aparatur untuk mendukung peningkatan kualitas dan kuantitas pelayanan infrastruktur dan pemerataannya antar wilayah guna penguatan arus barang dan jasa	Pemalang			Terlaksananya pembinaan teknis dan administrasi serta pengendalian sektor peja terminal selama satu tahunan selama satu tahun	2 kgt	Meningkatnya pengelolaan pelayanan perparkiran di tepi jalan	100%	211,124,000	52.420.500	1	Dishub
1	9	15	11	Inventarisasi data sarana, prasarana dan fasilitas perhubungan	Keberlanjutan peningkatan kualitas dan kuantitas pelayanan infrastruktur dan pemerataannya antar wilayah guna penguatan arus barang dan jasa	Terciptanya peningkatan kapasitas sumber daya aparatur untuk mendukung peningkatan kualitas dan kuantitas pelayanan infrastruktur dan pemerataannya antar wilayah guna penguatan arus barang dan jasa	Pemalang			Terlaksananya kegiatan pengumpulan dan pelaporan data kinerja perhubungan	1 kgt	Tersedianya Inventarisasi data sarana, prasarana dan fasilitas perhubungan	100%	182,075,000	257.812.500	1	Dishub
1	9	15	12	Penmbangunan prasarana dan fasilitas perhubungan	Keberlanjutan peningkatan kualitas dan kuantitas pelayanan infrastruktur dan pemerataannya antar wilayah guna penguatan arus barang dan jasa	Terciptanya peningkatan kapasitas sumber daya aparatur untuk mendukung peningkatan kualitas dan kuantitas pelayanan infrastruktur dan pemerataannya antar wilayah guna penguatan arus barang dan jasa	Pemalang				1 kgt (sertifikasi tanah pelabuhan)	Tersedianya prasarana dan fasilitas perhubungan	100%	145,987,500	561.000.000	1	Dishub
1	9	16		Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas LLAJ					Prosentase terlaksananya rehabilitasi dan pemeliharaan prasarana dan fasilitas LLAJ	100%				433,623,000	270,865,650		
1	9	16	1	Rehabilitasi/pemeliharaan sarana alat pengujian kendaraan bermotor	Keberlanjutan peningkatan kualitas dan kuantitas pelayanan infrastruktur dan pemerataannya antar wilayah guna penguatan arus barang dan jasa	Terciptanya peningkatan kapasitas sumber daya aparatur untuk mendukung peningkatan kualitas dan kuantitas pelayanan infrastruktur dan pemerataannya antar wilayah guna penguatan arus barang dan jasa	Pemalang			Terlaksananya pemeliharaan dan kalibrasi alat uji dan tersedianya alat uku emisi gas buang	1 kgt,	Terpelihara dan berfungsinya alat uji kendaraan bermotor dengan baik	100%	92,000,000	101,200,000	1	Dishub
1	9	16	2	Rehabilitasi/pemeliharaan prasarana balai pengujian kendaraan bermotor	Keberlanjutan peningkatan kualitas dan kuantitas pelayanan infrastruktur dan pemerataannya antar wilayah guna penguatan arus barang dan jasa	Terciptanya peningkatan kapasitas sumber daya aparatur untuk mendukung peningkatan kualitas dan kuantitas pelayanan infrastruktur dan pemerataannya antar wilayah guna penguatan arus barang dan jasa	Pemalang			Terlaksananya pemeliharaan balai pengujian kendaraan bermotor	1 gedung	Terpelihara dan berfungsinya balai pengujian kendaraan bermotor dengn baik	100%	45,000,000	49,500,000	1	Dishub

1	9	16	4	Rehabilitasi/pemeliharaan terminal/pelabuhan	Keberlanjutan peningkatan kualitas dan kuantitas pelayanan infrastruktur dan pemerataannya antar wilayah guna penguatan arus barang dan jasa	Terciptanya peningkatan kapasitas sumber daya aparatur untuk mendukung peningkatan kualitas dan kuantitas pelayanan infrastruktur dan pemerataannya antar wilayah guna penguatan arus brg & js	Pemalang			Terlaksananya pemeliharaan terminal	1 terminal	Terpeliharaan dan berfungsinya terminal dengan baik	100%	-		1	Dishub
1	9	16	5	Rehabilitasi/pemeliharaan rambu-rambu lalu lintas	Keberlanjutan peningkatan kualitas dan kuantitas pelayanan infrastruktur dan pemerataannya antar wilayah guna penguatan arus barang dan jasa	Terciptanya peningkatan kapasitas sumber daya aparatur untuk mendukung peningkatan kualitas dan kuantitas pelayanan infrastruktur dan pemerataannya antar wilayah guna penguatan arus barang dan jasa	Pemalang			Terlaksananya pemeliharaan APILL dan rambu lalu lintas	4 jenis	Terpelihara dan berfungsinya APILL dan rambu dengan baik	100%	187,381,500	317.109.650	1	Dishub
1	9	16	8	Rehabilitasi/pemeliharaan halte	Keberlanjutan peningkatan kualitas dan kuantitas pelayanan infrastruktur dan pemerataannya antar wilayah guna penguatan arus barang dan jasa	Terciptanya peningkatan kapasitas sumber daya aparatur untuk mendukung peningkatan kualitas dan kuantitas pelayanan infrastruktur dan pemerataannya antar wilayah guna penguatan arus barang dan jasa	Pemalang			Jumlah halte yang terpelihara	1 paket	Terpelihara dan berfungsinya halte dengan baik	100%	54,641,500	60,105,650	1	Dishub
1	9	16	9	Rehabilitasi/pemeliharaan sarana dan prasarana perlintasan KA	Keberlanjutan peningkatan kualitas dan kuantitas pelayanan infrastruktur dan pemerataannya antar wilayah guna penguatan arus barang dan jasa	Terciptanya peningkatan kapasitas sumber daya aparatur untuk mendukung peningkatan kualitas dan kuantitas pelayanan infrastruktur dan pemerataannya antar wilayah guna penguatan arus barang dan jasa	Pemalang			Terpeliharanya sarana dan prasarana perlintasan KA	2 jenis (pemeliharaan pos perlintasan KA dan pemeliharaan perlintasan KA)	Terpelihara dan berfungsinya sarana dan prasarana perlintasan KA dengn baik	100%	54,600,000	60,060,000	1	Dishub
1	9	17		Program Peningkatan Pelayanan Angkutan				Prosentase meningkatnya pelayanan angkutan	100%					6,160,904,500	6,776,994,950		
1	9	17	4	Kegiatan uji kelayakan sarana transportasi guna keselamatan penumpang	Keberlanjutan peningkatan kualitas dan kuantitas pelayanan infrastruktur dan pemerataannya antar wilayah guna penguatan arus barang dan jasa	Terciptanya peningkatan kapasitas sumber daya aparatur untuk mendukung peningkatan kualitas dan kuantitas pelayanan infrastruktur dan pemerataannya antar wilayah guna penguatan arus barang dan jasa	Pemalang			Terlaksananya kegiatan pemeriksaan berkala kendaraan bermotor	2 kegiatan	Meningkatnya keselamatan penumpang angkutan umum penumpang/barang	100%	1,877,540,000	2,065,294,000	1	Dishub

1	9	17	5	Kegiatan penciptaan disiplin pengoperasian angkutan umum di jalan raya	Keberlanjutan peningkatan kualitas dan kuantitas pelayanan infrastruktur dan pemerataannya antar wilayah guna penguatan arus barang dan jasa	Terciptanya peningkatan kapasitas sumber daya aparatur untuk mendukung peningkatan kualitas dan kuantitas pelayanan infrastruktur dan pemerataannya antar wilayah guna penguatan arus barang dan jasa	Pemalang			Terlaksananya kegiatan operasi tertib administrasi dan laik jalan kendaraan bermotor angkutan umum	80 orang	Angkutan umum dalam kondisi baik dan meningkatnya keselamatan transportasi jalan	100%	62,480,000	68,728,000	1	Dishub
1	9	17	6	Kegiatan penciptaan keamanan dan kenyamanan penumpang di lingkungan terminal	Keberlanjutan peningkatan kualitas dan kuantitas pelayanan infrastruktur dan pemerataannya antar wilayah guna penguatan arus barang dan jasa	Terciptanya peningkatan kapasitas sumber daya aparatur untuk mendukung peningkatan kualitas dan kuantitas pelayanan infrastruktur dan pemerataannya antar wilayah guna penguatan arus barang dan jasa	Pemalang			Terlaksananya kegiatan pengamanan penumpang di lingkungan terminal pada masa angkutan lebaran dan tersedianyabantuan bus mudik lebaran	408 Orang	Meningkatnya keamanan bagi penumpang di lingkungan terminal dan meningkatnya pelayanan angkutan umum bagi masyarakat	100%	138,910,000	152,801,000	1	Dishub
1	9	17	9	Kegiatan penciptaan disiplin dan pemeliharaan kebersihan di lingkungan terminal A	Keberlanjutan peningkatan kualitas dan kuantitas pelayanan infrastruktur dan pemerataannya antar wilayah guna penguatan arus barang dan jasa	Terciptanya peningkatan kapasitas sumber daya aparatur untuk mendukung peningkatan kualitas dan kuantitas pelayanan infrastruktur dan pemerataannya antar wilayah guna penguatan arus barang dan jasa	Pemalang, Petarukan, Comal			Terlaksananya pemeliharaan kebersihan di lingkungan UTP Pemalang	4 term, 12 bulan	Terpeliharanya kebersihan terminal dan meningkatnya pelayanan terminal	100%	1,622,430,000	1,784,673,000	1	Dishub
1	9	17	11	Pengumpulan dan analisis data base pelayanan angkutan	Keberlanjutan peningkatan kualitas dan kuantitas pelayanan infrastruktur dan pemerataannya antar wilayah guna penguatan arus barang dan jasa	Terciptanya peningkatan kapasitas sumber daya aparatur untuk mendukung peningkatan kualitas dan kuantitas pelayanan infrastruktur dan pemerataannya antar wilayah guna penguatan arus barang dan jasa	Pemalang			Terlaksananya analisis jaringan trayek	1 dokumen	Tersedianya jaringan trayek dengan baik guna mendukung pelayanan angkutan umum	100%	122,160,000	134,376,000	1	Dishub
1	9	17	12	Pengembangan sarana dan prasarana pelayanan jasa angkutan	Keberlanjutan peningkatan kualitas dan kuantitas pelayanan infrastruktur dan pemerataannya antar wilayah guna penguatan arus barang dan jasa	Terciptanya peningkatan kapasitas sumber daya aparatur untuk mendukung peningkatan kualitas dan kuantitas pelayanan infrastruktur dan pemerataannya antar wilayah guna penguatan arus barang dan jasa	Pemalang			Terlaksananya peningkatan sarana dan prasarana pelayanan angkutan umum	1 kgt	Meningkatnya sarana pada prasarana perhubungan	100%	73,482,000	80,830,200	1	Dishub
1	9	17	13	Fasilitasi perizinan di bidang perhubungan	Keberlanjutan peningkatan kualitas dan kuantitas pelayanan infrastruktur dan pemerataannya antar wilayah guna penguatan arus barang dan jasa	Terciptanya peningkatan kapasitas sumber daya aparatur untuk mendukung peningkatan kualitas dan kuantitas pelayanan infrastruktur dan pemerataannya antar wilayah guna penguatan arus barang dan jasa	Pemalang			Terlaksananya kegiatan pelayanan perizinan angkutan umum	1 kgt	Meningkatnya pelayanan perizinan trayek angkutan umum	100%	61,050,000	67,155,000	1	Dishub

1	9	17	15	Kegiatan pemilihan dan pemberian penghargaan sopir/ juru mudi/awak kendaraan umum teladan	Keberlanjutan peningkatan kualitas dan kuantitas pelayanan infrastruktur dan pemerataannya antar wilayah guna penguatan arus barang dan jasa	Terciptanya peningkatan kapasitas sumber daya aparatur untuk mendukung peningkatan kualitas dan kuantitas pelayanan infrastruktur dan pemerataannya antar wilayah guna penguatan arus barang dan jasa	Pemalang			Terlaksananya pemilihan dan pengiriman peserta AKUT	40 orang,	Meningkatnya kemampuan sopir dalam pelayanan angkutan umum	100%	23,537,500	25,891,250	1	Dishub
1	9	17	16	Koordinasi dalam peningkatan pelayanan angkutan	Keberlanjutan peningkatan kualitas dan kuantitas pelayanan infrastruktur dan pemerataannya antar wilayah guna penguatan arus barang dan jasa	Terciptanya peningkatan kapasitas sumber daya aparatur untuk mendukung peningkatan kualitas dan kuantitas pelayanan infrastruktur dan pemerataannya antar wilayah guna penguatan arus barang dan jasa	Pemalang			Terlaksananya koordinasi dalam peningkatan pelayanan angkutan	12 laporan	Bertambahnya kapasitas SDM perhubungan guna meningkatnya pelayanan angkutan	100%	58,620,000	64,482,000	1	Dishub
1	9	17	18	Kegiatan penciptaan disiplin dan pemeliharaan kebersihan di lingkungan terminal B	Keberlanjutan peningkatan kualitas dan kuantitas pelayanan infrastruktur dan pemerataannya antar wilayah guna penguatan arus barang dan jasa	Terciptanya peningkatan kapasitas sumber daya aparatur untuk mendukung peningkatan kualitas dan kuantitas pelayanan infrastruktur dan pemerataannya antar wilayah guna penguatan arus barang dan jasa	Rddongkal, Moga, Belik, Warungpring			Terlaksananya pemeliharaan kebersihan di lingkungan UTP Randudongkal	4 term, 12 bulan	Terpeliharanya kebersihan terminal dan meningkatnya pelayanan terminal	100%	2,120,695,000	2,332,764,500	1	Dishub
1	9	18		Program Pembangunan Sarana dan Prasarana Perhubungan					Prosentase terlaksananya pembangunan sarana dan prasarana perhubungan	100%				2,500,000,000	2,750,000,000		
1	9	18	1	Pembangunan gedung terminal	Keberlanjutan peningkatan kualitas dan kuantitas pelayanan infrastruktur dan pemerataannya antar wilayah guna penguatan arus barang dan jasa	Terciptanya peningkatan kapasitas sumber daya aparatur untuk mendukung peningkatan kualitas dan kuantitas pelayanan infrastruktur dan pemerataannya antar wilayah guna penguatan arus barang dan jasa	Pemalang			Terwujudnya pembangunan gedung terminal	1 paket	Pengurangan lahan terminal bongkar muat barang	100%	2,500,000,000	2,750,000,000	1	Dishub
1	9	19		Program Pengendalian dan Pengamanan Lalu Lintas					Prosentase terwujudnya pengendalian dan pengamanan lalu lintas	100%				3,463,400,000	3,809,740,000		
1	9	19	1	Pengadaan rambu-rambu lalu lintas	Keberlanjutan peningkatan kualitas dan kuantitas pelayanan infrastruktur dan pemerataannya antar wilayah guna penguatan arus barang dan jasa	Terciptanya peningkatan kapasitas sumber daya aparatur untuk mendukung peningkatan kualitas dan kuantitas pelayanan infrastruktur dan pemerataannya antar wilayah guna penguatan arus barang dan jasa	Pemalang			Tersedianya rambu lalu lintas	2 jenis	Meningkatnya keselamatan lalu lintas jalan	100%	710,540,000	781,594,000	1	Dishub

1	9	19	2	Pengadaan Marka Jalan	Meningkatkan sarana prasarana dasar serta memperkuat sentra-sentra produksi berbasis kewilayahan sesuai dengan karakteristik dan potensi wilayah	Meningkatkan kemudahan akses transportasi masyarakat	Pemalang			Terbuatnya marka jalan	1 paket	Terpenuhinya pengadaan marka jalan	100%	474,100,000	521,510,000		Dishub
1	9	19	4	Pengadaan sarana dan prasarana perlengkapan jalan	Keberlanjutan peningkatan kualitas dan kuantitas pelayanan infrastruktur dan pemerataannya antar wilayah guna penguatan arus barang dan jasa	Terciptanya peningkatan kapasitas sumber daya aparatur untuk mendukung peningkatan kualitas dan kuantitas pelayanan infrastruktur dan pemerataannya antar wilayah guna penguatan arus barang dan jasa	Pemalang			Tersedianya sarana dan prasarana perlengkapan jalan	2 jenis	Meningkatnya keselamatan lalu lintas jalan	100%	1,238,820,000	1,362,702,000	1	Dishub
1	9	19	5	Pengendalian dan pengamanan lalu lintas di jalan	Keberlanjutan peningkatan kualitas dan kuantitas pelayanan infrastruktur dan pemerataannya antar wilayah guna penguatan arus barang dan jasa	Terciptanya peningkatan kapasitas sumber daya aparatur untuk mendukung peningkatan kualitas dan kuantitas pelayanan infrastruktur dan pemerataannya antar wilayah guna penguatan arus barang dan jasa	Pemalang			Terlaksananya pengamanan lalu lintas jalan selama satu tahun	3 kgt	Meningkatnya ketertiban dan keselamatan lalu lintas	100%	989,950,000	1,088,945,000	1	Dishub
1	9	19	6	Koordinasi dalam pengendalian dan pengamanan lalu lintas	Keberlanjutan peningkatan kualitas dan kuantitas pelayanan infrastruktur dan pemerataannya antar wilayah guna penguatan arus barang dan jasa	Terciptanya peningkatan kapasitas sumber daya aparatur untuk mendukung peningkatan kualitas dan kuantitas pelayanan infrastruktur dan pemerataannya antar wilayah guna penguatan arus barang dan jasa	Pemalang			Terlaksananya koordinasi tim lalu lintas (traffic board) Kabupaten Pemalang dalam satu tahun	1 kgt	Terciptanya kebijakan bidang lalu lintas jalan di Kabupaten Pemalang	100%	49,990,000	54,989,000	1	Dishub

BAB IV

PENUTUP

Rencana Kerja (Renja) Satuan Kerja Perangkat Daerah Dinas Perhubungan Kabupaten Pemalang Tahun 2021 mengacu pada Rancangan RPJMD Kabupaten Pemalang Tahun 2016-2021 dan RKPD Kabupaten Pemalang Tahun 2021. Renja ini diharapkan dapat menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan program dan kegiatan pada Dinas Perhubungan Kabupaten Pemalang dengan sasaran pembangunan Pemerintah Kabupaten Pemalang, sehingga target kinerja pada akhir tahun periode Renstra dapat tercapai.

Dinas Perhubungan melaksanakan satu urusan yaitu urusan perhubungan. Urusan perhubungan diprioritaskan pada peningkatan manajemen transportasi darat, peningkatan kapasitas sumber daya aparatur perhubungan, dan peningkatan pelayanan angkutan.

Program dan kegiatan yang disusun dalam Renja ini merupakan program dan kegiatan yang bersifat indikatif, sehingga dalam pelaksanaannya akan sangat tergantung pada kondisi, regulasi, prioritas, dan ketersediaan anggaran pemerintah daerah pada tahun anggaran bersangkutan.

Dalam pelaksanaan Renja Dinas Perhubungan Kabupaten Pemalang Tahun 2020, dimungkinkan terjadi perkembangan dan dinamika pembangunan yang harus diakomodir.

Sebagai konsekuensinya diperlukan langkah-langkah penyesuaian terhadap Renja Dinas Perhubungan Kabupaten Pemalang Tahun 2021, yang akan terwujud dalam perubahan Renja Dinas Perhubungan Kabupaten Pemalang Tahun 2021.

Pemalang, Agustus 2020

**PIL. KEPALA DINAS PERHUBUNGAN
KABUPATEN PEMALANG**



EKO EDI PRIHARTANTO, SH., MM

Pembina Utama Muda

NIP. 19651104 199403 1 008